

# SENATOR



ISSN 2978 - 3118

ISSN 2987-3118



MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

EDISI I / APRIL 2025

## KHUSUS

Tarif Timbal Balik AS Naik:  
Sultan B Najamudin Dukung  
Pemerintah Lakukan Negosiasi

13

## NUSANTARA

Sultan Minta Pemerintah  
Berikan Pupuk Subsidi  
Bagi Petani Sawit

19

# DPD RI APRESIASI SEMANGAT PERSATUAN UMAT ISLAM



Akses  
MAJALAH SENATOR  
Versi Digital  
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

## VARIA SENAT

Sidpur Ke-11 Tahun 2024-2025  
DPD RI Sahkan 10 Keputusan

41

## SETJEN

Korpri Setjen DPD RI  
Bagikan 1001 Bingkisan

53



# Tantangan Tarif Dagang Amerika Serikat dan Jalan Tengah untuk Ekonomi Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Indonesia dihadapkan pada tantangan eksternal yang semakin kompleks. Salah satu isu yang menonjol adalah kebijakan tarif dagang yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap sejumlah komoditas ekspor. Sebagai negara dengan orientasi ekspor yang cukup tinggi pada sektor-sektor strategis seperti tekstil, alas kaki, dan produk manufaktur lainnya, Indonesia perlu merespons dinamika ini dengan langkah-langkah yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dan terstruktur.

Kebijakan proteksionisme yang diambil oleh Amerika Serikat sejatinya merupakan refleksi dari dinamika geopolitik dan tekanan ekonomi domestik di negara tersebut. Namun, bagi negara berkembang seperti Indonesia, keputusan tersebut berdampak langsung terhadap kinerja ekspor nasional dan iklim investasi. Penurunan permintaan dari pasar Amerika tidak hanya mengurangi pendapatan devisa, tetapi juga menimbulkan risiko pada stabilitas ketenagakerjaan dan pertumbuhan industri manufaktur dalam negeri.

Dalam konteks ini, diversifikasi pasar ekspor harus menjadi langkah strategis utama. Indonesia tidak dapat bergantung pada pasar tradisional semata. Kawasan potensial seperti Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin dapat menjadi mitra dagang alternatif yang menjanjikan. Pemerintah perlu memperkuat kerja sama bilateral dan multilateral, sekaligus membuka jalur perdagangan baru melalui perjanjian dagang yang saling menguntungkan dan

berpihak pada kepentingan nasional.

Selanjutnya, penguatan daya saing produk dalam negeri menjadi agenda yang tidak bisa ditunda. Ini berarti pemerintah harus berinvestasi pada riset, pengembangan teknologi, dan penciptaan nilai tambah industri nasional. Ekosistem industri hulu-hilir perlu dibangun secara terpadu, agar Indonesia tidak terus-menerus berada pada posisi sebagai pengeksport bahan mentah atau sekadar perakitan barang. Kemandirian industri harus menjadi visi jangka panjang.

Pendidikan vokasi, pelatihan teknis, serta insentif bagi pelaku usaha kecil dan menengah menjadi bagian dari solusi holistik. Generasi muda Indonesia harus disiapkan bukan hanya untuk menjadi pekerja di sektor industri, tetapi juga menjadi inovator dan pelaku ekonomi kreatif yang mampu menciptakan produk kompetitif untuk pasar global. Peran negara dalam menciptakan ekosistem tersebut sangat krusial, baik melalui regulasi, dukungan fiskal, maupun insentif riset.

Dengan demikian, tantangan tarif dagang dari Amerika Serikat tidak harus dilihat sebagai krisis semata, melainkan juga sebagai momentum transformasi. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain penting dalam rantai pasok global, asalkan mampu mengambil langkah berani dan konsisten. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat akan menjadi kunci bagi lahirnya ekonomi nasional yang lebih tangguh, adaptif, dan berdaya saing tinggi di tengah turbulensi global. (\* / Arso P Nugroho)

**SENATOR**

MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

**PENASEHAT:** Rahman Hadi, Lalu Niqman Zahir, Oni Choiruddin; **PENANGGUNGJAWAB:** Mahyu Darma  
**PEMIMPIN REDAKSI:** Heru Firdan; **REDAKTUR PELAKSANA:** Budi Fitra Helmi; **REDAKTUR FOTO & GRAFIS:** Agus Wiharto; **EDITOR SENIOR:** Intan Fitria Yuliani, Arso P Nugroho; **DESAIN GRAFIS & FOTOGRAFER:** Subbagian Media Setjen DPD RI; **TIM PENULIS ARTIKEL:** Heru Firdan, Budi Fitra Helmi, Intan Fitria Yuliani, Arso Pranoto Nugroho, Helena Agustina Fernandez Ojan, Muhamad Fathoni, Theresia Oktavina, Betria Eriani, Didin Saputra, Mas Aryo Kristiyanto, Fandi Tri Prayogo, Hestiana Kiftia Sari, Rini Sumarni, Nanda Russia Rola, Adhi Nugroho, Lela Sadiyah

## KANTOR REDAKSI

Bagian Pemberitaan dan Media Lantai 1 Gedung B DPD RI, Jl Gatot Subroto No 6 Jakarta Pusat 10270. Email : keranjangsenator@gmail.com Kotak Saran : majalah\_senator@dpd.go.id // website : www.dpd.go.id // IG : @dpdri // FB: www.facebook.com/DPDRI // X @dpdri



# USA Trade Tariff Challenge and Compromise for Indonesian Economic

*In the past few years, Indonesian economy has been facing an ever-growing complex external challenge. One of the most protruding issues is the trade tariff imposed by the USA against a number of export commodities. As a country with high export orientation in such strategic sectors as textile, footwears, and other manufacturing products, Indonesia has to respond this dynamic not only reactively but also proactively and structurally.*

*The protective policy exerted by the USA is essentially the reflection of geopolitical and domestic economic pressure dynamic in the country. Nevertheless, for developing country like Indonesia, such policy has direct impact toward export performance and investment climate. Decreasing demand from American market does not only reduce foreign income earnings but it also increases the risks on employment stability and domestic manufacturing industrial growth.*

*Within the context, export market diversification should become primary strategical steps. Indonesia can no longer rely on merely traditional markets. Potential regions such as Middle East, Africa, and Latin America can be promisingly alternative trading partners. The government needs to strengthen bilateral and multilateral cooperation while at the same time opens new trade routes which are mutually beneficial and supportive to national interests.*

*Furthermore, enhancing domestic product*

*competitiveness can no longer be a postponable agenda. It prompts the government to invest in research, technology development, creation of national industry added value. Upstream-downstream industrial ecosystem should integrally be built in order for Indonesia to cease the position of being exporter of raw material or merely assembler. The industrial independency should be a long term vision.*

*Vocational education, technical training, and incentives to small medium enterprises become parts of holistic solution. Indonesian young generation should be prepared not only to be workers in industrial sectors, but more so to be innovators and creative economy players that are capable to discover competitive products for global markets. The government's role in creating such ecosystem is very crucial through regulations, fiscal supports, and research incentives.*

*Therefore, the challenge posted by USA trade tariff should not only be deemed as a crisis only as it is also a momentum for transformation. Indonesia possesses great potential to become a key player in global supply-chain provided that it dares to take bold and consistent steps. Synergy between the government, business community, and the society will be a key to giving birth to a national economy which is resilient, adaptive and highly competitive in the midst of global turbulence.*

**(\* / Arso P. Nugroho)**

**SENATOR**

MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

**ADVISOR BOARD:** Rahman Hadi, Lalu Niqman Zahir, Oni Choiruddin; **NEWS IN CHARGE:** Mahyu Darma **EDITOR-IN-CHIEF:** Heru Firdan; **MANAGING EDITOR:** Budi Fitra Helmi; **PHOTO & GRAPHICS EDITOR:** Agus Wiharto; **SENIOR EDITORS:** Intan Fitria Yuliani, Arso P Nugroho; **GRAPHIC DESIGNER & PHOTOGRAPHER:** Subbagian Media Setjen DPD RI; **ARTICLE WRITER:** Arso Pranoto Nugroho, Helena Agustina Fernandez Ojan, Muhamad Fathoni, Theresia Oktavina, Betria Eriani, Didin Saputra, Mas Aryo Kristiyanto, Fandi Tri Prayogo, Hestiana Kiftia Sari, Rini Sumarni, Nanda Russia Rola, Adhi Nugroho, Lela Sadiyah.

**EDITORIAL OFFICE** News and Media Division, 1st Floor, Building B, DPD RI, Jl Gatot Subroto No 6, Central Jakarta 10270.  
Email: keranjangsenator@gmail.com Suggestions Box: majalah\_senator@dpd.go.id // website: www.dpd.go.id // IG: @dpdri // FB: www.facebook.com/DPDRI // X @dpdri



# DPD RI APRESIASI Semangat Persatuan Umat Islam

Theresia Oktavina

Penulis

**P**emerintah melalui Kementerian Agama secara resmi menetapkan 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada tanggal 31 Maret 2025.

Keputusan tersebut diumumkan oleh Menteri Agama, Nasaruddin Umar, usai memimpin sidang isbat penetapan awal Syawal yang digelar di Kantor Kementerian Agama, Sabtu (29/3/2025). Sidang turut dihadiri para pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dari berbagai penjurur Tanah Air.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin, menyambut baik hasil sidang isbat yang menghasilkan kesepakatan bersama dalam penetapan Hari Raya Idulfitri.

“Ini menjadi pertanda positif bagi semangat persatuan umat Islam Indonesia.”

— Sultan B Najamudin, Ketua DPD RI

“Alhamdulillah, kita patut mengapresiasi Kementerian Agama dan seluruh ormas Islam yang berhasil menyatukan pandangan dalam menetapkan 1 Syawal pada hari yang sama,” ujar Sultan, Senin (31/3/2025).

Dalam suasana penuh sukacita Idulfitri, Sultan menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat menjadikan hari kemenangan ini sebagai

momentum untuk memperkuat semangat persaudaraan dan pengabdian kepada bangsa.

“Selamat merayakan Hari Raya Idulfitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Mari kita saling memaafkan dan saling mendukung dalam membangun negeri yang kita cintai ini,” — ujar Sultan.

Senator asal Bengkulu tersebut juga menyoroti kelancaran arus mudik Lebaran tahun ini yang dinilainya cukup baik. Ia memberikan apresiasi kepada pemerintah, jajaran Kepolisian, serta BUMN yang telah bahu-membahu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama masa mudik. Kehadiran infrastruktur dan koordinasi yang solid, menurutnya, sangat membantu kelancaran perjalanan masyarakat menuju kampung halaman.

Sultan juga mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap para pekerja sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Menurutnya, pemberian bantuan hari raya (BHR) merupakan bentuk nyata kepedulian negara kepada kelompok pekerja rentan.

“Idulfitri kali ini benar-benar menjadi hari kemenangan yang membawa kebahagiaan bagi seluruh elemen bangsa,”

— tegasnya.

Menutup pernyataannya, Sultan memanjatkan doa agar para pemimpin dan rakyat Indonesia senantiasa dikaruniai kekuatan lahir batin dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Ia berharap Indonesia terus melangkah menjadi bangsa yang kuat, berdaulat, serta mandiri secara ekonomi.

“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan bagi bangsa ini, menjadikannya negeri yang diridai, sejahtera, dan penuh kemuliaan,”

— pungkasnya. (\*)



**Ketua DPD RI Sultan B Najamudin**  
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Khotbah Idulfitri 1446 H yang Sarat Makna dari Wakil Ketua DPD RI

# Tamsil Linrung: Kejayaan Bangsa Butuh Solidaritas dan Keberlanjutan

Arso P Nugroho

Penulis

**W**akil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, tampil sebagai khatib Solat Idulfitri 1446 Hijriah di kawasan Matraman Raya, Jakarta, Senin (31/3/2025). Dalam khotbahnya yang mengalir penuh hikmah, Tamsil mengajak umat Islam dan seluruh bangsa Indonesia untuk merenungi kembali makna sejati dari kejayaan sebuah bangsa.

“Kejayaan bangsa tidak hanya ditentukan oleh limpahan sumber daya, tetapi oleh keberlanjutan dan solidaritas sosial yang menopang kehidupan bersama,”

— Tamsil Linrung

Mengutip kisah legendaris negeri Saba', Tamsil menggambarkan bagaimana sebuah negeri yang kaya raya dan makmur bisa hancur karena abai terhadap nilai-nilai spiritual dan kebersamaan. Saba' adalah negeri yang diberkahi dengan

kebun anggur, tanah subur, dan kehidupan tentram. Namun kehancurannya terjadi bukan karena kekurangan, melainkan karena kehilangan jiwa solidaritas dan dimensi keberlanjutan.

“Mereka menanggalkan kebersamaan, membiarkan solidaritas meranggas. Akibatnya, mereka terjerembab dalam bencana yang meluluhlantakkan segalanya.”

Menurut Tamsil, kisah Saba' adalah cermin masa depan, sebuah peringatan bagi bangsa Indonesia yang dianugerahi kekayaan alam luar biasa. Jika tidak dikelola dengan bijak dan berkeadilan, kekayaan itu dapat menjadi bumerang. Ia menekankan bahwa kemakmuran sejati hanya dapat tercapai jika dibangun di atas fondasi solidaritas dan pemerataan.

Dalam pandangannya, distribusi kekayaan bukan sekadar kebijakan teknokratis. Ia menyebutnya sebagai arsitektur besar dalam membangun peradaban. Pemerataan, keberlanjutan, dan keadilan sosial harus menjadi nilai-nilai utama dalam mengelola sumber daya nasional.

“Reformasi fiskal dan redistribusi sumber daya adalah dua pilar utama dari strategi kemakmuran yang kini mulai dikumandangkan Presiden Prabowo,”

— tegas Senator asal Sulawesi Selatan itu.

Sebagai penutup khotbahnya, Tamsil mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan Hari Raya Idulfitri sebagai momen reflektif dan titik awal untuk aksi nyata dalam memperkuat persatuan, menghapus ketimpangan, dan merawat keberlanjutan hidup bangsa. (\*)

**Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung**  
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

# Idulfitri Momentum Tingkatkan Kepedulian

Mas Aryo Kristiyanto

Penulis

**I**dulfitri bukan cuma soal baju baru dan hidangan lezat di meja makan. Lebih dari itu, hari raya ini adalah waktu yang pas untuk merenung dan memperbaiki diri. Bagi banyak orang, momen Lebaran jadi titik balik—untuk tumbuh jadi pribadi yang lebih sabar, peduli, dan dekat dengan nilai-nilai kebaikan.

Di sisi lain, ini juga saat yang tepat untuk memperkuat ikatan dengan sesama, dan memberi energi positif bagi bangsa.

Senator DPD RI asal DKI Jakarta, Fahira Idris, melihat Idulfitri sebagai momen yang membawa pesan kuat: saatnya mempererat persaudaraan dan saling menopang dalam membangun masa depan bersama. “Idulfitri juga menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat persaudaraan dan komitmen demi kontribusi nyata membangun bangsa yang lebih maju serta bermartabat,” ucapnya menyambut Lebaran 1446 H, Sabtu (29/3/2025).

Bagi Fahira, bulan Ramadan meninggalkan pelajaran penting tentang berbagi. zakat, infak, dan sedekah bukan sekadar kewajiban, tapi bentuk nyata kepedulian terhadap sesama. Dan semangat itu, menurutnya, jangan



Anggota DPD RI Fahira Idris

berhenti saat takbir berku-mandang. “Kepedulian terhadap sesama adalah bagian dari nilai kemanusiaan yang harus senantiasa dirawat,” katanya. Menolong sesama adalah cara sederhana tapi berdampak besar dalam menciptakan masyarakat yang lebih hangat dan sejahtera.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa, semangat saling peduli sangat dibutuhkan. Menurut Fahira, Lebaran bukan cuma selebrasi, tapi juga pengingat bahwa banyak orang di sekitar yang perlu uluran tangan dan empati. “Semangat Idulfitri tidak hanya menandai kemenangan secara personal, tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya meningkatkan kepekaan terhadap kondisi sekitar,” katanya.

Fahira juga mengajak semua kalangan untuk menjadikan Lebaran sebagai momen

kebangkitan bersama. Setiap orang punya peran dalam memperkuat solidaritas sosial. Karena tanpa itu, kesenjangan makin melebar dan kemajuan jadi sulit diraih. “Idulfitri bisa jadi waktu yang pas untuk refleksi—apa kontribusi kita terhadap lingkungan sosial? Semoga ke depannya, langkah kita bisa berdampak lebih besar,” ujarnya penuh harap.

Ia percaya, bangsa ini akan makin kuat jika dibangun dengan semangat gotong royong dan rasa peduli. Menurutnya, nilai-nilai Ramadan harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. “Dengan menanamkan semangat kebersamaan dan kepedulian, perubahan positif bisa kita wujudkan bersama. Yang penting, jangan biarkan ada yang tertinggal dalam perjalanan kita menuju Indonesia yang lebih baik,” tutup Fahira dengan senyum optimis. (\*)

# Lebaran Waktu yang Tepat Perjuangkan Aspirasi Masyarakat

Mas Aryo Kristiyanto

Penulis

**L**ebaran jadi momen yang pas untuk mempererat hubungan, tak hanya antar keluarga, tapi juga antartokoh daerah. Itulah yang dilakukan anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma. Di Hari Raya Idulfitri 1446 H, Senin (31/3/2025), ia bersilaturahmi ke rumah dinas Wakil Bupati Aceh Timur, T. Zainal Abidin, di Kecamatan Idi Rayeuk.

Pertemuan hangat ini bukan cuma ajang bertukar kabar, tapi juga jadi ruang diskusi ringan soal pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh Timur. Dalam suasana Lebaran yang penuh keakraban, Haji Uma mengajak semua pihak untuk menjaga komunikasi dan kebersamaan demi kemajuan daerah. “Lebaran bukan hanya tentang perayaan, tetapi juga tentang kebersamaan, kepedulian, dan membangun komunikasi yang baik antar sesama,” ujarnya.

Tak hanya bersilaturahmi dengan pejabat daerah, Haji Uma juga menunjukkan empatinya kepada masyarakat. Di hari yang sama, ia menyempatkan diri mengunjungi rumah duka almarhumah Ayra Kaysa—balita asal Aceh Timur yang meninggal



Anggota DPD RI Sudirman atau Haji Uma bersama Wakil Bupati Aceh Timur T. Zainal Abidin. (Foto Dok Pribadi)

“**Lebaran bukan hanya tentang perayaan, tetapi juga tentang kebersamaan, kepedulian, dan membangun komunikasi yang baik antar sesama.**”

Anggota DPD RI,  
Sudirman

dunia usai menjalani perawatan di RS Harapan Kita Jakarta. Kunjungan ini menjadi simbol kepedulian yang konsisten ia tunjukkan selama ini.

Wakil Bupati Aceh Timur, T. Zainal Abidin, menyambut baik kunjungan sang senator. Ia menilai kehadiran Haji Uma bukan sekadar formalitas Lebaran, tapi benar-benar mencerminkan perhatian terhadap kondisi masyarakat

di daerah. “Beliau adalah sosok yang selalu dekat dengan rakyat dan peduli terhadap permasalahan yang ada di daerah,” ungkapnya.

Keduanya sepakat bahwa silaturahmi seperti ini penting untuk menjaga sinergi antar tingkat pemerintahan. Dengan komunikasi yang terbuka dan saling mendukung, berbagai persoalan di daerah bisa lebih mudah diselesaikan. Haji Uma berharap hubungan baik dengan pemerintah kabupaten seperti Aceh Timur bisa terus berjalan dan ditingkatkan.

Lebaran tahun ini bukan hanya membawa kebahagiaan, tapi juga semangat baru untuk terus bergerak bersama. Bagi Haji Uma, silaturahmi dan kepedulian adalah kunci memperjuangkan aspirasi rakyat. Dan di Aceh Timur, semangat itu terasa begitu nyata. (\*)



# Senator Manfaatkan Momen Lebaran Diskusikan Pembangunan Daerah

Adhi Nugroho

Penulis

**L**ebaran Idulfitri 1446 Hijriah tak hanya jadi momen saling memaafkan, tapi juga ruang untuk membicarakan masa depan daerah. Itulah yang dilakukan Senator asal Kepulauan Riau (Kepri), Ismeth Abdullah, saat bersilaturahmi dengan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, Selasa (1/4/2025). Pertemuan hangat itu berlangsung di sela-sela acara *open house* di Gedung Daerah, Tanjung Pinang.

Dalam suasana penuh keakraban, keduanya berdiskusi tentang berbagai isu strategis yang tengah dihadapi Kepri. Mulai dari kelanjutan proyek ambisius Jembatan Batam-Bintan, penciptaan lapangan kerja baru, hingga langkah-langkah untuk meningkatkan pendapatan daerah agar pembangunan bisa terus berjalan.

Bagi Ismeth Abdullah, pembangunan Jembatan Batam-Bintan bukan sekadar proyek infrastruktur, tapi lompatan besar bagi masa depan Kepri. “Ini proyek strategis yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antarpulau. Kami ingin memastikan kelanjutan pembangunannya berjalan



Anggota DPD RI Ismeth Abdullah bersama Gubernur Kepri Ansar Ahmad. (Foto Istimedia)

“Ini proyek strategis yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antarpulau. Kami ingin memastikan kelanjutan pembangunannya berjalan sesuai rencana.”

Anggota DPD RI,  
Ismeth Abdullah

sesuai rencana,” ujar mantan Gubernur pertama Kepri itu.

Sementara itu, Gubernur Ansar Ahmad menegaskan komitmen Pemprov Kepri untuk membuka lebih banyak ruang investasi. Tujuannya jelas: menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal. “Kami terus mendorong investasi yang

mampu menyerap tenaga kerja. Optimalisasi pendapatan daerah juga jadi fokus agar pembangunan bisa berkelanjutan,” kata Ansar.

Pertemuan tersebut tak hanya formalitas Lebaran. Ada semangat kolaborasi yang terasa kental di antara para pimpinan daerah yang hadir, termasuk Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamora, dan sejumlah pejabat lainnya. Diskusi mereka menjadi refleksi bahwa pembangunan daerah bisa terus bergerak maju jika semua pihak saling bersinergi.

Dengan semangat Lebaran, para pemimpin Kepri menyatukan tekad untuk menjadikan provinsi ini lebih maju dan sejahtera. Dan tentu saja, langkah-langkah konkret sudah mulai dirancang sejak hari yang penuh berkah ini. (\*)

# Lebaran Momen yang Tepat Untuk Pererat Silaturahmi



Anggota DPD RI Muslim M Yatim bersama masyarakat yang menghadiri silaturahmi di kediamannya. (Foto Dok Pribadi)

## Mas Aryo Kristiyanto

Penulis

**L**ebaran bukan cuma soal ketupat dan opor ayam. Di tangan para senator, momen Idulfitri juga jadi waktu yang tepat untuk menyapa masyarakat dan memperkuat silaturahmi. Setidaknya, itulah yang dilakukan anggota DPD RI asal Sumatera Barat, Muslim M Yatim, saat menggelar acara halal bihalal bersama warga di kediamannya, Jalan Air Camar, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Rabu (2/4/2025).

Di tengah suasana hangat dan penuh kebersamaan, Muslim Yatim menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idulfitri 1446 H. Ia mengajak masyarakat untuk terus menjaga silaturahmi, memperkuat kepedulian sosial, dan saling mendukung

demis kemajuan daerah. “Lebaran bukan hanya tentang perayaan, tetapi tentang kebersamaan, kepedulian, dan membangun komunikasi yang baik antar sesama,” ujarnya.

Tak hanya itu, Muslim M Yatim juga berbagi cerita saat ia menjadi khatib Solat Idulfitri di halaman Kantor Gubernur Sumbar. Ribuan jemaah memenuhi setiap sudut lokasi. “Luar biasa sekali, betapa indahnya momen hari raya tahun ini. Semua tempat penuh, umat Islam benar-benar antusias menyambut hari kemenangan,” kenangnya dengan senyum.

Idulfitri kali ini terasa istimewa karena merupakan yang pertama di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Yang lebih membahagiakan, menurut Muslim Yatim, umat Islam di seluruh

Indonesia melaksanakan Idulfitri secara serentak. Tidak ada perbedaan penetapan hari raya antara ormas-ormas Islam seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Sejak Pak Prabowo menjadi Presiden, Indonesia bisa menyatukan Idulfitri. Semua umat Islam di mana-mana serempak melaksanakan Salat Ied di hari yang sama. Rasanya lebih semangat dan penuh kekompakan,” ungkapnya.

Muslim M Yatim juga menyebut komunikasi dengan Presiden Prabowo terasa lebih nyaman dan terbuka. Ia berharap hal ini menjadi awal yang baik untuk memperjuangkan aspirasi daerah, sejalan dengan semangat DPD RI: Dari Daerah Untuk Indonesia. “Semoga ini titik temu untuk banyak kebaikan bagi Sumatera Barat dan daerah-daerah lainnya,” tutupnya. (\*)



# Idulfitri dan Harapan Baru dari Bumi Rafflesia

Fandi Tri Prayogo

Penulis

Tak sekadar ucapan selamat dan jabat tangan penuh kehangatan, momentum Lebaran tahun ini benar-benar dimaknai dalam oleh Senator asal Bengkulu, Destita Khairilisani. Di tengah suasana Idulfitri 1446 H yang penuh suka cita, Destita menyampaikan harapan agar Lebaran tak hanya menjadi momen kemenangan, tapi juga awal kebangkitan bagi masyarakat Bengkulu.

“*Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal yaa kariim. Minal aidin wal faizin*, mohon maaf lahir dan batin,” ucap Destita dalam pesan lebarannya yang dikutip dari Bengkulu Today, Selasa (1/4/2025). Lebaran, menurutnya, adalah momen untuk mempererat silaturahmi, memupuk persaudaraan, dan menumbuhkan kembali kepedulian terhadap sesama.

Senator muda ini percaya bahwa semangat kebersamaan yang muncul di hari raya harus terus dijaga, bahkan setelah gema takbir berhenti. “Lebaran jangan hanya jadi rutinitas tahunan. Jadikan ini awal untuk memperkuat sinergi kita dalam membangun Bengkulu,” tuturnya.



Anggota DPD RI Destita Khairilisani (Foto Dokumen pribadi)

“**Lebaran jangan hanya jadi rutinitas tahunan. Jadikan ini awal untuk memperkuat sinergi kita dalam membangun Bengkulu.**”

Anggota DPD RI,  
Destita Khairilisani

Tak hanya berbicara soal harapan, Destita juga mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam program “Bantu Rakyat”, inisiatif dari pemerintah daerah yang fokus pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, program ini sejalan dengan semangat Lebaran yang penuh kepedulian.

“Dengan semangat gotong royong dan kepedulian, saya yakin kita bisa membawa Bengkulu ke arah yang lebih baik. Idulfitri ini bisa menjadi titik awal kebangkitan masyarakat kita,” ujar Destita optimis.

Di tengah suasana hangat Lebaran, pesan Senator Destita mengalir seperti doa agar Bengkulu tidak hanya merayakan kemenangan secara spiritual, tapi juga bangkit secara sosial dan ekonomi. Sebab dari kepedulian kecil, perubahan besar bisa dimulai. (\*)

# Senator Lia dan Pantun Arus Balik: Manis Seperti Gulali

Betria Eriani

Penulis

**L**ibur Lebaran 1446 Hijriah sudah hampir rampung. Wajah-wajah ceria yang beberapa hari lalu memadati kampung halaman kini mulai bersiap kembali ke kota, menjemput rutinitas dan rezeki. Di tengah gegap gempita arus balik, senator asal Jawa Timur, Lia Istifhama, tampil beda dengan pesan khasnya: pantun ceria yang menyemangati pemudik.

*“Pas lebaran pake baju tunik,  
jangan lupa senyum tulus  
supaya terlihat manis bak gulali.*

*Buat yang arus balik mudik,  
semoga lancar dan semangat  
bekerja kembali.”*

Begitu tulisnya di akun media sosial, disambut antusias warganet. Bukan hanya berpantun, Lia juga menyampaikan pesan serius: arus balik bukan sekadar perjalanan fisik, tapi juga ujian kesabaran dan kesiapan mental. Dari kemacetan panjang, cuaca tak menentu, hingga tubuh yang mulai kelelahan setelah euforia Lebaran—semuanya perlu diantisipasi dengan baik.

“Periksa kendaraan, jaga stamina, dan jangan me-



Anggota DPD RI Lia Istifhama (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

**“Periksa kendaraan, jaga stamina, dan jangan memaksakan diri jika lelah. Keselamatan selalu jadi yang utama.”**

**”**

**Anggota DPD RI,  
Lia Istifhama**

maksakan diri jika lelah. Keselamatan selalu jadi yang utama,” ujar Lia.

Ia juga mengingatkan pentingnya saling mengingatkan antar sesama pemudik. “Arus balik yang aman dan nyaman adalah tanggung jawab bersama. Lebaran akan terasa lebih indah jika ditu-

tup dengan kembalinya kita ke rumah dalam keadaan sehat,” imbuhnya.

Sebagai senator yang dikenal aktif menyuarakan aspirasi masyarakat Jawa Timur, Lia menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak pada keselamatan, kenyamanan, dan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, infrastruktur transportasi dan edukasi keselamatan pemudik harus terus ditingkatkan.

“Selamat kembali beraktivitas! Arus balik semoga lancar, penuh berkah, dan membawa semangat baru untuk terus berkarya,” tutup Lia dengan senyum khasnya. (\*)

# Sambut Mudik Lebaran, Senator Mirah Tinjau Bandara, Pelabuhan, dan Terminal

Helena AF Ojan

Penulis

**M**enyambut arus mudik Lebaran 2025, Senator asal Nusa Tenggara Barat, Mirah Midadan Fahmid, turun langsung meninjau sejumlah titik transportasi utama di NTB. Pada Jumat (28/3/2025), ia menyambangi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Pelabuhan Gilimas, hingga Terminal Dinas Perhubungan NTB. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan segala sesuatunya berjalan lancar demi kenyamanan masyarakat yang hendak pulang kampung.

“Mudik itu momen sakral buat banyak orang. Setelah setahun penuh bekerja, semua orang ingin pulang dan berkumpul dengan keluarga. Jadi transportasi harus kita pastikan aman dan nyaman,” ujar Senator Mirah. Menurutnya, tantangan di sektor ini tak bisa dianggap remeh, apalagi ketika volume pemudik melonjak tajam dalam waktu singkat.

Di bandara internasional kebanggaan NTB itu, Mirah menyebut bahwa segala persiapan menyambut lonjakan penumpang sudah cukup baik. Saat ini, jumlah penumpang harian sekitar 6.000 orang dan diperkirakan akan terus meningkat



Anggota DPD RI Mirah Midadan Fahmid saat mengunjungi Pelabuhan Gilimas. (Foto Medsos)

“Mudik itu momen sakral buat banyak orang. Setelah setahun penuh bekerja, semua orang ingin pulang dan berkumpul dengan keluarga. Jadi transportasi harus kita pastikan aman dan nyaman.”

Anggota DPD RI,  
Mirah Midadan Fahmid

mendekati Lebaran. Namun, pihak bandara diyakini masih mampu mengatasinya tanpa kendala berarti.

Berlanjut ke Pelabuhan Gilimas, suasana juga terantau tertib dan terkendali. Tidak ada antrean panjang maupun lonjakan penumpang yang mengkhawatirkan. “Saya lihat pelayanan di sini cukup

siap. Arus keberangkatan dan kedatangan berjalan lancar. Ini menunjukkan kerja sama yang baik antarinstansi,” ujar Mirah mengapresiasi.

Sementara di Terminal Dinas Perhubungan NTB, perhatian Mirah tertuju pada aspek keselamatan dan kenyamanan armada darat. Ia berharap semua kendaraan yang mengangkut pemudik telah melalui proses uji kelayakan, demi menghindari insiden yang tidak diinginkan selama perjalanan.

Kunjungan ini bukan sekadar seremoni. Senator Mirah ingin memastikan langsung bahwa semua moda transportasi – baik darat, laut, maupun udara – benar-benar siap melayani masyarakat. “Mudik itu soal perasaan. Kita ingin pulang dengan hati tenang. Maka dari itu, kenyamanan dan keselamatan harus jadi prioritas,” tutupnya. (\*)

Tarif Timbal Balik AS Naik:

# Sultan B Najamudin Dukung Pemerintah Lakukan Negosiasi

Betria Eriani

Penulis

**K**etua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menanggapi serius kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menaikkan tarif resiprokal atau tarif timbal balik atas produk ekspor Indonesia menjadi 32 persen, dari sebelumnya hanya 10 persen. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 9 April 2025 dan dinilai berpotensi memukul ekspor Indonesia, terutama pada sektor-sektor utama seperti tekstil, alas kaki, dan komoditas lainnya.

“Kenaikan tarif ini tentu akan berdampak langsung terhadap permintaan barang-barang Indonesia di pasar Amerika Serikat. Biaya ekspor yang lebih tinggi bisa membuat produk kita kalah bersaing,” ujar Sultan, Minggu (6/4/2025).

Menanggapi hal tersebut, Sultan mendukung langkah Pemerintah Indonesia yang segera melakukan negosiasi dengan pihak AS. Ia menekankan pentingnya verifikasi dan validasi data ekspor-impor antara kedua negara sebagai dasar dalam proses negosiasi.



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin bersama Presiden Prabowo Subianto. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“Perbedaan data ekspor dan impor antara Jakarta dengan Washington perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak. Saya yakin Presiden Trump akan mempertimbangkan kembali kebijakannya jika melihat kepentingan substantif kedua negara,” katanya. Sultan juga mengingatkan agar tetap menghormati keputusan politik dan ekonomi yang diambil oleh Presiden Trump dalam konteks tanggung jawab terhadap situasi ekonomi global.

Selain diplomasi dagang, Sultan mengingatkan Pemerintah Indonesia agar tetap waspada terhadap potensi gangguan perdagangan global yang lebih luas akibat kebijakan tarif AS. Ia menyambut baik langkah antisipatif yang

telah ditempuh Presiden Prabowo Subianto sejak awal pemerintahan.

Menurut Sultan, strategi hilirisasi komoditas, keikutsertaan dalam kerja sama ekonomi multilateral seperti BRICS, serta perjanjian dagang regional menjadi kunci dalam melindungi kepentingan ekonomi Indonesia. Ia juga menyoroti pentingnya menjaga daya beli masyarakat melalui desentralisasi fiskal, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pendirian koperasi Merah Putih di setiap desa.

“Ini bentuk proteksi yang sehat bagi ekonomi nasional kita, sekaligus upaya memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat dari bawah,” pungkasnya. (\*)

# Indonesia Harus Segera Ambil Langkah Strategis

Adhi Nugroho

Penulis

**K**etua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Ahmad Nawardi mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah strategis dalam menghadapi kebijakan tarif timbal balik atau resiprokal yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Produk Indonesia yang masuk ke pasar AS kini dikenakan tarif hingga 32 persen, lebih tinggi dibandingkan Malaysia (24 persen) dan Filipina (17 persen).

“Kenaikan tarif sebesar ini bisa berdampak luas terhadap perekonomian nasional, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah, ancaman PHK, dan tekanan terhadap dunia usaha, baik besar maupun UMKM,” kata Nawardi dalam keterangannya, Jumat (4/4/2025).

Senator asal Jawa Timur itu menilai kebijakan tersebut dapat memicu tekanan serius pada sektor ekspor Indonesia, terutama di bidang manufaktur. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh atas dampak kebijakan tarif AS, baik dalam jangka pen-



Anggota DPD RI Ahmad Nawardi (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“**Kenaikan tarif sebesar ini bisa berdampak luas terhadap perekonomian nasional, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah, ancaman PHK, dan tekanan terhadap dunia usaha, baik besar maupun UMKM.**”

**Ketua Komite IV  
DPD RI,  
Ahmad Nawardi**

dek, menengah, maupun panjang.

“Pemerintah perlu segera memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara ASEAN, OKI, dan BRICS+, serta mengalokasikan pendanaan untuk men-

dukung pelaku usaha dan memperkuat pasar domestik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Nawardi juga menyarankan agar Indonesia mempertimbangkan penerapan tarif serupa terhadap produk-produk impor asal AS. Menurutnya, kebijakan ini penting untuk menunjukkan ketegasan posisi Indonesia dalam percaturan dagang global.

“Jika Indonesia menerapkan kebijakan tarif yang sama terhadap produk-produk AS, kita dapat memberikan sinyal bahwa Indonesia memiliki posisi kuat dalam perdagangan internasional. Kita tidak boleh hanya menjadi objek dalam perang dagang global ini,” pungkasnya. (\*)

## Pemerintah Harus Cermat Ambil Kebijakan: Kondisi Ekonomi Indonesia Tidak Sedang Baik-baik Saja

Arso P Nugroho

Penulis

**A**nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Agustin Teras Narang mengingatkan bahwa kondisi ekonomi nasional saat ini perlu dicermati secara serius, seiring tren pelemahan ekonomi global, melemahnya nilai tukar rupiah, dan kebijakan tarif resiproskal sebesar 32 persen yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap produk Indonesia.

“Sebuah keadaan yang menegaskan bahwa kondisi ekonomi kita sepertinya tidak sedang baik-baik saja,” ujar Teras dalam keterangannya, Jumat (4/4/2025).

Senator asal Kalimantan Tengah itu menyoroti penurunan jumlah penduduk sebesar 24 persen pada Idulfitri 2025, dari 193,6 juta menjadi 146,48 juta orang. Ia juga mengutip data Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang mencatat perputaran ekonomi saat Lebaran hanya mencapai Rp137,975 triliun, turun 12,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp157,3 triliun.

Menurut Teras, penurunan ini menjadi indikator nyata dari tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.



Anggota DPD RI Agustin Teras Narang (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“Sebuah keadaan yang menegaskan bahwa kondisi ekonomi kita sepertinya tidak sedang baik-baik saja.”

Anggota DPD RI,  
Agustin Teras Narang

Karena itu, ia mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam mengelola keuangan, menahan pengeluaran yang tidak penting, dan cermat dalam berinvestasi.

Di tingkat daerah, Teras mendorong pemerintah daerah untuk bekerja lebih efektif dan inovatif dalam menghadapi keterbatasan anggaran. Ia meminta agar

kepala daerah fokus meningkatkan pelayanan publik dan mengelola keuangan daerah dengan cermat demi kesejahteraan rakyat.

Untuk pemerintah pusat, Teras meminta agar tetap konsisten pada kebijakan efisiensi dan cermat dalam merespons tekanan ekonomi global. Ia juga menyoroti pentingnya stabilitas politik dan sosial dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional.

“Langkah keliru akan dapat menghambat langkah maju. Mari kita hadapi tantangan ini secara solid, profesional, dan menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?” pungkasnya. (\*)



# Kenaikan Tarif AS Bisa Picu Resesi Ekonomi Indonesia



Bhima Yudhistira (Foto Dok Pribadi)

## Fandi Tri Prayogo

Penulis

**D**irektur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kebijakan tarif timbal balik atau tarif resiprokal sebesar 32 persen yang diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS) terhadap produk Indonesia dapat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional.

“Bisa picu resesi ekonomi Indonesia di kuartal IV 2025,” kata Bhima seperti dikutip Antara, Kamis (3/4/2025).

Menurut Bhima, dampak kebijakan tersebut tidak hanya akan dirasakan pada penurunan kuantitas ekspor Indonesia ke AS, tetapi juga berpotensi menurunkan

“**Bisa picu resesi ekonomi Indonesia di kuartal IV 2025.**”

**Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira**

volume ekspor ke negara-negara lain. Ia menilai sektor otomotif dan elektronik menjadi sektor yang paling terancam.

Ia menjelaskan, konsumen AS akan menanggung beban tarif melalui kenaikan harga kendaraan, yang pada akhirnya menurunkan penjualan di pasar AS. Mengingat adanya korelasi antara ekonomi AS dan Indonesia, penurunan pertumbuhan

ekonomi AS sebesar 1 persen dapat berdampak pada penurunan ekonomi Indonesia sebesar 0,08 persen.

Selain itu, Bhima juga menyebut industri padat karya seperti pakaian jadi dan tekstil berpotensi mengalami kontraksi. Hal ini disebabkan banyaknya merek global asal AS yang memiliki pangsa pasar besar di Indonesia. Kenaikan tarif membuat perusahaan-perusahaan tersebut kemungkinan akan menurunkan jumlah pesanan ke pabrik di Indonesia.

“Di sisi lain, pasar dalam negeri bisa dibanjiri produk dari Vietnam, Kamboja, dan China karena mereka mulai mengincar pasar alternatif,” ujarnya.

Untuk meredam dampak negatif tersebut, Bhima menyarankan pemerintah Indonesia segera mengambil langkah strategis. Di antaranya adalah menarik relokasi pabrik dari luar negeri dengan memberikan regulasi yang konsisten, mempercepat proses perizinan, memperkuat infrastruktur kawasan industri, menyediakan sumber energi terbarukan yang memadai, serta meningkatkan kesiapan sumber daya manusia. (\*)

# Indonesia Siap Hadapi Tarif Resiprokal AS dengan Kepala Dingin

Lela Sadiyah

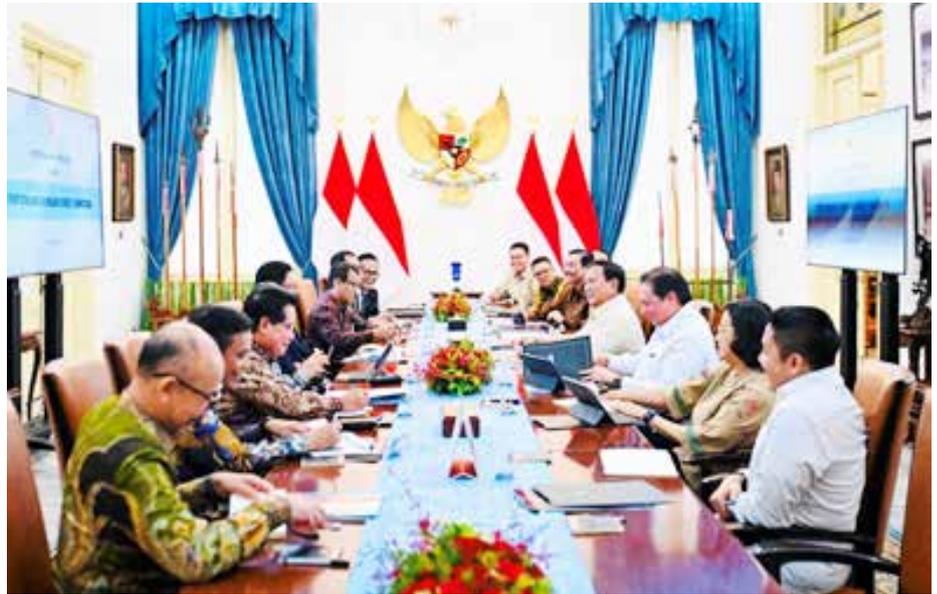
Penulis

**P**residen RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia siap menghadapi kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menaikkan tarif resiprokal sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia. Ia menyatakan, Indonesia akan menyikapi langkah tersebut dengan kepala dingin dan penuh percaya diri.

“Kita akan buka perundingan sama Amerika. Kita akan menyampaikan, kita ingin hubungan yang baik. Kita ingin hubungan yang adil. Kita ingin hubungan yang setara. Jadi kita tidak ada masalah,” ujar Prabowo saat menghadiri panen raya di Majalengka, Jawa Barat, Senin (7/4/2025).

Presiden juga menekankan pentingnya prinsip kesetaraan dalam hubungan internasional. Menurutnya, setiap permintaan dari negara lain yang masuk akal akan dihormati, selama tetap memperhatikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Pemimpin Amerika memikirkan kepentingan rakyatnya. Kita memikirkan kepentingan rakyat kita. Tidak perlu ada rasa



Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Senin, 7 April 2025. (Foto Setpres)

“**Kita akan buka perundingan sama Amerika. Kita akan menyampaikan, kita ingin hubungan yang baik. Kita ingin hubungan yang adil. Kita ingin hubungan yang setara. Jadi kita tidak ada masalah.**”

Presiden RI,  
Prabowo

kecewa, tidak perlu ada rasa khawatir. Kita percaya dengan kekuatan kita sendiri,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin pagi, untuk membahas respons pemerintah

terhadap perkembangan ekonomi global, termasuk kebijakan tarif AS. Rapat tersebut dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah diplomasi ekonomi yang terkoordinasi. Menurutnya, pembahasan posisi Indonesia terhadap kebijakan AS sudah dilakukan secara mendalam.

“Pak Presiden menugaskan saya, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Keuangan untuk segera menyampaikan posisi resmi Indonesia kepada pemerintah AS sebelum tanggal 9,” ujar Airlangga usai rapat. (\*)



# Trump Beberkan Alasan Naikkan Tarif Resiprokal untuk Indonesia



Presiden AS Donald Trump. (Foto CNBC Indonesia/Reuters)

**Mas Aryo Kristiyanto**

Penulis

**P**residen Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengungkapkan alasan di balik kebijakan kenaikan tarif resiprokal sebesar 32 persen terhadap produk-produk asal Indonesia. Menurut Trump, kebijakan tersebut merupakan respons atas tingginya tarif impor yang diterapkan Indonesia terhadap produk asal AS.

Dalam pernyataannya yang dikutip dari [whitehouse.gov](https://www.whitehouse.gov) dan diberitakan oleh [Bisnis.com](https://www.bisnis.com), Rabu (2/5/2025), Trump menyebut tarif bea masuk etanol di Indonesia mencapai 30 persen, jauh le-

bih tinggi dibandingkan tarif di AS yang hanya 2,5 persen. “Brasil 18 persen dan Indonesia 30 persen mengenakan tarif yang lebih tinggi pada etanol dari Amerika Serikat 2,5 persen,” ujarnya.

Trump juga menyoroti penerapan kebijakan persyaratan konten lokal di berbagai sektor di Indonesia. Menurutnya, kebijakan tersebut membatasi produk impor dan merugikan eksportir asal AS. Selain itu, ia mengkritik rumitnya rezim perizinan impor di Indonesia yang dinilai melibatkan banyak instansi dan kementerian, meskipun otoritas utama berada di Kementerian Perdagangan.

Lebih jauh, Trump mengungkapkan kekecewaannya terhadap ketimpangan penerapan prinsip Most Favoured Nation (MFN) dalam sistem perdagangan global. Ia menilai AS selama ini telah dirugikan oleh ketidakseimbangan tarif antarnegara anggota World Trade Organization (WTO).

“Sederhananya, sementara anggota WTO sepakat untuk mengikat tarif mereka berdasarkan MFN, dan memberikan tarif terbaik kepada semua anggota, mereka tidak sepakat untuk mengikat tarif mereka pada tingkat yang sama rendahnya atau menerapkan tarif secara timbal balik,” tegasnya. (\*)

# Sultan Minta Pemerintah Berikan Pupuk Subsidi bagi Petani Sawit

Arso P Nugroho

Penulis

**K**etua DPD RI Sultan B Najamudin kembali menyuarkan harapan para petani sawit mandiri agar komoditas andalan mereka bisa kembali masuk dalam daftar penerima subsidi pupuk dari pemerintah. Ia menyoroti Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 yang mencoret kelapa sawit dari daftar sembilan komoditas penerima subsidi. Dampaknya, para petani kecil—terutama yang hanya mengelola lahan 1-3 hektar—harus menanggung beban biaya pupuk yang semakin mahal.

“Kelapa sawit ini sebetulnya komoditas strategis. Banyak petani yang bergantung hidup dari sini. Bayangkan, ada hampir tujuh juta hektar kebun sawit yang dikelola oleh petani swadaya,” ujar Sultan saat menyapa langsung para petani sawit dalam kunjungan resesnya ke Desa Kembang Mumpo, Kabupaten Seluma, Bengkulu, Minggu (23/3/2025).

Di hadapan para petani, mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu menyampaikan keprihatinannya atas kebijakan tersebut. Ia berharap pemerintah bisa



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin

mengevaluasi ulang aturan subsidi pupuk yang ada, demi memberikan rasa keadilan bagi ratusan ribu petani sawit di berbagai daerah. “Kalau kita ingin petani sejahtera, tentu insentif seperti subsidi pupuk ini tidak bisa diabaikan,” tambahnya.

Sultan juga menyinggung dampak nyata dari kebijakan itu, yaitu menurunnya produktivitas dan nilai tukar petani sawit. Saat ini, produktivitas sawit di Indonesia rata-rata masih di bawah empat ton per hektare jauh di bawah capaian negara tetangga seperti Malaysia. “Padahal kita punya potensi besar, tinggal bagaimana pemerintah mau hadir lebih serius,” ujarnya.

Menurut Sultan, dukungan terhadap industri sawit

tidak cukup hanya dari sisi kebijakan lahan atau harga jual. Lebih dari itu, diperlukan pendekatan menyeluruh mulai dari peningkatan riset, promosi, perbaikan tata kelola, hingga penguatan hilirisasi. “Petani sawit ini bukan hanya butuh pupuk, mereka juga butuh kepastian dan dukungan yang menyeluruh dari hulu sampai hilir,” tegasnya.

Ia pun menutup pertemuan tersebut dengan semangat dan harapan. “Saya akan terus suarkan ini di Senayan. Kita ingin petani sawit mandiri bisa berdiri tegak di tanahnya sendiri, dan berdaya tanpa harus menunggu belas kasih,” ucap Sultan, disambut anggukan penuh harap dari para petani yang hadir. (\*)

# Peran Aktivis dalam Politik Sangat Vital Bawa Perubahan



Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

## Mas Aryo Kristiyanto

Penulis

**W**akil Ketua DPD RI Tamsil Linrung kembali menunjukkan komitmennya sebagai sosok yang tak melupakan akar perjuangannya. Sebagai mantan aktivis, Tamsil menegaskan bahwa dirinya akan selalu terbuka kepada para aktivis muda dan siap berdialog dengan mereka. Menurutnya, kehadiran aktivis dalam ruang politik sangat penting karena mereka membawa semangat perubahan yang tulus dan tak tergadai.

“Kalau saja di Senayan hanya ada DPD RI, saya ingin gerbangnya dibuka lebar-lebar untuk aktivis,” ucap Tamsil disambut antusias mahasiswa dalam kunjungan resesnya ke Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (22/3/2025). “Politik tanpa

“**Kalau saja di Senayan hanya ada DPD RI, saya ingin gerbangnya dibuka lebar-lebar untuk aktivis.**”

**Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung**

keberanian aktivis adalah politik yang kehilangan ruh perjuangan,” tambahnya lantang.

Diskusi berlangsung hangat di Ruang Senat Mahasiswa UNM. Di hadapan para mahasiswa, Tamsil menyuarakan pandangannya tentang perlunya membangun politik yang lebih inklusif dan berpihak pada rakyat. “Kita harus kembalikan politik pada marwahnya: sebagai ruang gagasan, bukan hanya perebutan kekuasaan,” tegasnya.

Tak hanya soal politik,

Tamsil juga menyentil soal praktik penyelewengan kekuasaan. Ia mengkritik keberadaan oknum di institusi kepolisian yang menurutnya sudah mulai menjamur. “Penyalahgunaan wewenang bukan cuma merusak institusi, tapi juga merobek kepercayaan publik pada keadilan,” ujarnya sambil menekankan pentingnya reformasi institusional yang berani dan menyentuh akar persoalan.

Para mahasiswa pun tak tinggal diam. Mereka memanfaatkan forum ini untuk menyampaikan aspirasi dan keresahan mereka secara langsung. Salah satu yang mencuri perhatian adalah Afiq Naufal, aktivis muda yang menyampaikan apresiasinya terhadap Tamsil. “Pak Tamsil ini memadukan dua ideologi besar dan politik kehadiran. Beliau ingin politik jadi rahmat, bukan sekadar alat kekuasaan,” katanya.

Diskusi yang semula bernuansa formal perlahan berubah menjadi ruang inspiratif. Penuh semangat dan idealisme, para aktivis muda tampak menemukan harapan baru lewat dialog dengan Tamsil Linrung. Seolah mereka sedang menegaskan bahwa meski zaman berubah, semangat perjuangan tidak boleh padam. (\*)

# Haji Uma ke Pangdam IM Berkeluh Banyak Warga Aceh Korban TPPO



Anggota DPD RI Sudirman atau Haji Uma bersama Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Niko Fahrizal. (Foto Tim Haji Uma)

**Theresia Oktavina**

Penulis

**A**nggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang lebih dikenal dengan nama Haji Uma, kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap nasib warga Aceh di luar negeri. Dalam pertemuannya dengan Panglima Kodam Iskandar Muda, Mayjen TNI Niko Fahrizal, Kamis (27/3/2025), Haji Uma menyampaikan keprihatinan soal maraknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menimpa warga Aceh.

Ia menjelaskan bahwa banyak warga Aceh tergiur janji manis para agen tenaga kerja ilegal, yang menjanjikan pekerjaan bergaji besar di luar negeri. Namun

kenyataannya, sesampainya di negara tujuan seperti Myanmar, Laos, Kamboja, dan Filipina, mereka justru dijebak untuk bekerja dalam praktik-praktik ilegal, seperti menjadi scammer atau operator judi *online*. Bahkan tak jarang mereka disiksa jika tidak mencapai target.

“Masalah ini diperburuk oleh minimnya pemahaman masyarakat dan kurangnya sosialisasi di lapangan. Banyak dari mereka tak tahu risiko yang mengintai,” ujar Haji Uma kepada Pangdam IM. Ia berharap ada keterlibatan aktif aparat di lapangan untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang rentan menjadi sasaran para agen.

Menanggapi hal itu, Pang-

dam IM pun langsung merespons dengan komitmen penuh. Ia menyatakan siap mengerahkan personel TNI, khususnya para Babinsa, untuk ikut menyosialisasikan bahaya TPPO di tengah masyarakat. Tak hanya itu, pihak Kodam juga mendukung upaya penindakan terhadap praktik perdagangan orang, sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku.

“Saya menyambut baik komitmen Pangdam IM. Dengan keterlibatan TNI dalam sosialisasi, kita berharap jumlah korban bisa ditekan dan masyarakat Aceh makin waspada,” kata Haji Uma usai pertemuan. Ia juga menambahkan bahwa sinergi ini sangat penting dalam memutus mata rantai jaringan TPPO yang selama ini sudah banyak memakan korban.

Selama ini, Haji Uma memang dikenal vokal dan aktif membantu warga Aceh yang terjebak dalam kasus TPPO di luar negeri. Tak sedikit korban yang berhasil dipulangkan berkat upaya advokasi Haji Uma melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI di berbagai negara. Komitmen itu pun terus ia jaga, demi melindungi masyarakat Aceh dari kejahatan lintas negara yang mematikan harapan. (\*)



# Senator Elviana Bagikan Sembako Buat Korban Banjir Sungai Buluh

Helena AF Ojan

Penulis

**S**enator asal Jambi, Elviana, kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat dengan turun langsung ke lokasi terdampak banjir di Dusun Sungai Buluh, Danau Buluh, Kecamatan Pasar, Kabupaten Bungo, Selasa (25/3/2025). Bersama Bank BPD Jambi, Elviana membagikan 100 paket sembako kepada warga yang terdampak banjir di wilayah tersebut.

Didampingi Pimpinan Cabang Bank BPD Jambi, Novita, serta perwakilan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat, Elviana menyerahkan langsung bantuan sembako yang berisi kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng. Bantuan tersebut disambut hangat warga yang antusias dan bersyukur atas perhatian yang mereka terima.

“Kegiatan ini adalah bentuk kepedulian dan aksi nyata untuk membantu masyarakat yang tengah mengalami kesulitan. Kita harus saling membantu dan bergotong royong saat menghadapi bencana seperti ini,” ujar Elviana. Ia juga menyampaikan bahwa kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BPD Jambi, sangat penting agar bantuan bisa cepat dan tepat sasaran.



Anggota DPD RI Elviana membagikan sembako untuk masyarakat yang terdampak banjir di Dusun Sungai Buluh, Danau Buluh, Kecamatan Pasar, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. (Foto Tim Elviana)

“Kegiatan ini adalah bentuk kepedulian dan aksi nyata untuk membantu masyarakat yang tengah mengalami kesulitan. Kita harus saling membantu dan bergotong royong saat menghadapi bencana seperti ini.”

Anggota DPD RI,  
Elviana

Dalam kesempatan itu, Elviana juga mengingatkan warga agar tetap waspada terhadap potensi banjir susulan. Ia mengimbau masyarakat untuk selalu siap siaga dan memperhatikan perkembang-

an cuaca serta kondisi lingkungan sekitar. “Kewaspadaan adalah kunci agar kita bisa menghindari risiko yang lebih besar,” pesannya kepada warga.

Kegiatan sosial ini pun mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Tokoh masyarakat dan aparat setempat menyambut baik langkah Elviana dan BPD Jambi. Mereka berharap sinergi semacam ini terus dilakukan untuk membantu masyarakat di masa-masa sulit.

Tak hanya dikenal sebagai legislator yang vokal di pusat, Elviana juga aktif hadir di tengah masyarakat. Komitmennya untuk terus mendampingi dan membantu warga Jambi menjadi bukti nyata bahwa peran senator bukan sekadar pembuat regulasi, tetapi juga pelayan rakyat dalam arti sesungguhnya. (\*)

# Senator Aji Mirni Mawarni Desak Aksi Nyata Berantas Tambang Ilegal

M. Fathoni

Penulis

**M**asalah tambang ilegal di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan serius. Senator DPD RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, Aji Mirni Mawarni, menilai pemerintah daerah perlu mengambil langkah lebih konkret dan strategis untuk menuntaskan persoalan yang telah berlangsung lama ini.

Dalam diskusi santai sambil berbuka puasa bersama pegiat media di Samarinda, Minggu (23/3/2025), Aji Mawarni mengisahkan pertemuannya dengan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud. Saat itu, Gubernur menyatakan komitmennya untuk memberantas tambang ilegal yang selama ini telah merugikan daerah secara ekonomi dan ekologis. Menanggapi hal itu, Aji Mawarni menyatakan dukungannya secara penuh.

Namun, ia menggarisbawahi bahwa dalam praktik di lapangan, penegakan hukum sering kali hanya menasar pelaku kecil, seperti operator tambang dan pemilik lahan. Sementara para pemodal besar, yang menjadi aktor utama, nyaris tak tersentuh. "Kasusnya selalu sama, pemodal bisa lolos, hanya orang-orang lapangan yang dikorbankan," tegasnya.



Anggota DPD RI Aji Mirni Mawarni (Foto Dok Pribadi)

“**Kasusnya selalu sama, pemodal bisa lolos, hanya orang-orang lapangan yang dikorbankan.**”

**Anggota DPD RI,  
Aji Mirni Mawarni**

Senator yang dikenal vokal ini menduga adanya kolusi antara pemodal dengan oknum aparat. Ia menilai permainan sistem seperti ini membuat tambang ilegal terus berlangsung tanpa hambatan berarti. “Kalau otak utamanya tidak disentuh, mustahil praktik ini bisa dihentikan,” ujarnya.

Aji Mawarni pun mende-

sak agar pengawasan oleh SKPD diperketat dan dijalankan secara konsisten. Ia juga menekankan perlunya pengawasan lintas sektor dan keterlibatan langsung dari pemerintah daerah. “Jangan sampai semangat pemberantasan tambang ilegal hanya jadi jargon kampanye. Kita butuh aksi nyata, bukan sekadar janji di media,” tandasnya.

Senator Aji Mawarni berharap Gubernur Kaltim dapat benar-benar mewujudkan komitmennya dengan strategi yang matang, terutama di wilayah-wilayah rawan tambang ilegal. Ia juga mengingatkan pentingnya memastikan bahwa tidak ada aparat pemerintah yang justru terlibat dalam praktik ilegal tersebut. (\*)

# Negeri Adat Belum Punya Perda: Senator Bisri Latuconsina Siap Dorong Panja Pemerintahan Adat di Maluku

Fandi Tri Prayogo

Penulis

Sebagai wilayah yang lekat dengan tradisi dan masyarakat adat, Maluku seharusnya menjadi contoh dalam pelaksanaan sistem pemerintahan adat. Namun realitas di lapangan justru sebaliknya. Banyak desa atau negeri di Maluku yang hingga kini belum memiliki peraturan daerah (Perda) maupun peraturan negeri (Perneg) yang mengatur sistem pemerintahan adat.

Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Maluku, Bisri As Shiddiq Latuconsina, menilai kondisi ini sebagai ironi yang harus segera diatasi. “Undang-Undang Desa jelas mengakui eksistensi desa adat. Tapi realisasinya masih sangat minim. Perda belum dibuat, Perneg juga belum banyak yang disusun,” ujarnya saat melakukan reses di Kota Ambon, Senin (24/3/2025).

Sebagai bentuk respons nyata, Bisri menyatakan komitmennya untuk membentuk panitia kerja (Panja) yang khusus menangani persoalan pemerintahan negeri adat di Maluku. Panja ini akan melibatkan



Anggota Komite I DPD RI Bisri As Shiddiq Latuconsina menerima aspirasi masyarakat di Kantor DPD RI, Provinsi Maluku. (Foto Tim Bisri As Shiddiq Latuconsina)

akademisi dari berbagai bidang untuk membantu mengidentifikasi persoalan, merancang regulasi, hingga menyusun draf Perneg sebagai landasan formal bagi tata kelola negeri adat.

Gagasan ini muncul setelah Bisri melakukan serangkaian pertemuan dengan tokoh adat, akademisi, dan aparat pemerintah setempat. Salah satu persoalan mendasar yang ia temui adalah rendahnya kapasitas aparatur desa dalam memahami dan mengelola administrasi pemerintahan berbasis adat. Karena itu, peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan juga menjadi bagian dari agenda

Panja.

Tak hanya soal regulasi di tingkat daerah, Bisri juga menyoroti pentingnya revisi Undang-Undang Desa. Ia menilai beberapa ketentuan dalam UU tersebut, seperti soal masa jabatan kepala desa dan pengakuan terhadap desa adat, masih perlu diperkuat agar sejalan dengan semangat pemberdayaan masyarakat adat.

Dengan langkah ini, Bisri berharap sistem pemerintahan adat di Maluku tidak hanya diakui secara hukum, tetapi juga benar-benar dapat dijalankan dengan baik demi menjaga kearifan lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat. (\*)

# Senator Eva Susanti Tinjau Jalan Tol Palembang-Betung

Betria Eriani

Penulis

**M**enjelang puncak arus mudik, infrastruktur transportasi menjadi perhatian utama banyak pihak. Tak terkecuali Anggota DPD RI asal Sumatera Selatan, Eva Susanti, yang turun langsung memantau kesiapan Jalan Tol Palembang-Betung, Senin (24/3/2025). Kehadirannya bertujuan memastikan kelancaran lalu lintas dan keamanan pemudik yang diprediksi meningkat tajam tahun ini.

Dalam kunjungan lapangan tersebut, Eva Susanti turut didampingi oleh Anggota DPR RI Wahyu Sanjaya, Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi, jajarannya Polda Sumsel, Bupati Banyuasin Askolani Jasi, Wakil Bupati Netta Indian, serta sejumlah kepala OPD dari Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Banyuasin.

Salah satu poin penting dari pemantauan ini adalah pembatasan kendaraan yang diperbolehkan melintasi tol Palembang-Betung. Jalur tol ini hanya dibuka untuk kendaraan pribadi mulai pukul 07.00 hingga 17.00 WIB, sementara kendaraan berat seperti truk



Anggota DPD RI Eva Susanti meninjau Jalan Tol Palembang-Betung. (Foto Viral Sumsel)

dan bus dilarang melintas selama periode arus mudik.

“Keselamatan pengguna jalan adalah prioritas utama. Kami ingin memastikan arus mudik berjalan tertib, aman, dan nyaman bagi semua,” ujar Eva Susanti usai pemantauan.

Pemerintah daerah pun telah melakukan berbagai persiapan. Bupati Banyuasin menegaskan kesiapan fasilitas pendukung seperti rest area, posko layanan kesehatan, serta koordinasi lintas instansi untuk menjaga kenyamanan para pemudik. Di sisi lain, Kapolda Sumsel menyampaikan komitmen kepolisian untuk memperketat pengawasan dan patroli demi mencegah kemacetan dan potensi gangguan keamanan di

jalur tol.

Dirlantas Polda Sumsel, Kombes Pol M Pratama Adhyasastra, menambahkan imbauan kepada seluruh pemudik untuk tetap berhati-hati, mematuhi rambu lalu lintas, dan beristirahat jika lelah. “Jangan paksakan berkendaraan dalam kondisi lelah. Periksa kendaraan sebelum berangkat dan pastikan semuanya dalam kondisi prima,” pesannya.

Kehadiran Senator Eva Susanti dalam pemantauan ini menunjukkan peran aktif DPD RI dalam memastikan pelayanan publik, termasuk kesiapan infrastruktur strategis seperti jalan tol, benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (\*)

# Senator Herman Soroti Jalur Nonprosedural PMI dari Kaltara

Lela Sadiyah

Penulis

**S**enator DPD RI asal Kalimantan Utara, Herman, belum lama ini menyambangi beberapa kantor perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltara, termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka menyerap aspirasi dan memantau langsung sejumlah isu yang sedang berkembang di provinsi perbatasan tersebut.

Salah satu persoalan yang jadi perhatian serius Herman adalah maraknya pekerja migran Indonesia (PMI) yang berangkat ke Malaysia lewat jalur nonprosedural. “Yang lewat jalur resmi cuma sedikit, yang nonprosedural justru lebih banyak,” ujarnya. Menurutnya, kondisi ini cukup memprihatinkan karena banyak kasus pekerja migran yang tidak terdata dan tidak mendapatkan perlindungan semestinya.

Senator Herman menyampaikan keprihatinannya karena para PMI yang berangkat secara ilegal itu rentan menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kecelakaan kerja, penelantaran, hingga kasus kema-



Anggota DPD RI Herman (Foto Dokumen pribadi)

tian yang tak tercatat. “Kalau mereka resmi, paling tidak pemerintah bisa tahu kalau ada masalah dan bisa bantu,” katanya.

Karena itu, ia mendorong agar jalur masuk pekerja migran dari Kaltara lebih diperketat. Apalagi Kaltara berbatasan langsung dengan Malaysia, yang membuat pengawasan menjadi tantangan tersendiri. Herman juga menyebutkan bahwa saat ini asal-usul pekerja migran pun sudah bergeser. “Dulu kebanyakan dari NTT, sekarang malah banyak dari Sulawesi,” ujarnya.

Tak hanya soal pengawasan, Herman juga mendorong pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK)

di Kaltara. Ia menilai keberadaan BLK sangat penting agar calon PMI bisa mendapatkan pelatihan yang layak sekaligus sertifikasi sebelum berangkat ke luar negeri. “Kalau ada BLK, kan mereka bisa lebih siap dan punya keahlian yang diakui,” katanya penuh harap.

Senator Herman berharap pemerintah pusat, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, bisa segera merealisasikan pembangunan BLK tersebut di Kaltara. Dengan begitu, pekerja migran dari provinsi ini tidak hanya bisa berangkat secara legal, tapi juga lebih berdaya saing dan terlindungi. (\*)

# Nelayan Mengadu ke LaNyalla Soal Reklamasi PSN SWL

Nanda Russia Rola

Penulis

**S**ejumlah nelayan yang tergabung dalam Himnunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Surabaya menyambangi Anggota DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Kamis (20/3/2025). Mereka mengadu soal proyek reklamasi bertajuk Surabaya Waterfront Land (SWL), yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) dan saat ini tengah berjalan di kawasan Perairan Pantai Timur Surabaya.

Ketua HNSI Kota Surabaya, Heru SR, menjelaskan bahwa berbagai langkah sudah mereka tempuh, mulai dari menyuarakan aspirasi ke Komisi IV DPR RI, hingga ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Tapi sejauh ini, proyek tersebut tetap berjalan, seolah suara nelayan tidak pernah dianggap penting.

Menurut Heru, ada banyak alasan mengapa proyek ini harus dihentikan. Selain mengganggu ekosistem pesisir, proyek ini juga dianggap merugikan warga lokal. "Identitas budaya pesisir tergerus, dan yang paling menyakitkan, nelayan kehilangan sumber pendapatan utama mereka," ucap



Anggota DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti sedang menerima aspirasi nelayan Surabaya. (Foto Tim LaNyalla Centre)

Heru.

Proyek SWL ini rencananya akan mereklamasi lahan seluas 1.084 hektare. Saat ini masih dalam tahap AMDAL, tapi dampaknya sudah terasa. Wilayah yang akan direklamasi selama ini dikenal sebagai "rumah ikan", tempat berkembang biaknya ikan yang menjadi andalan para nelayan. Bahkan nelayan dari Madura, Pasuruan, Sidoarjo, hingga Gresik pun menggantungkan hidup dari wilayah tersebut. "Kalau dibangun, habislah penghasilan kami," kata Pembina HNSI Surabaya, Samsurin.

Menanggapi hal itu, LaNyalla menegaskan bahwa pembangunan haruslah berpihak kepada rakyat, terutama mereka yang

menjadi stakeholder utama seperti nelayan. Ia berjanji akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk menindaklanjuti aduan ini. "Kalau pembangunan justru memiskinkan rakyat, maka itu bukan pembangunan yang adil," tegasnya.

Menurut LaNyalla, prinsip dasar pembangunan adalah menghadirkan manfaat bagi semua pihak, bukan hanya investor. "Nelayan harus tetap bisa hidup layak. Kalau proyek ini malah bikin mereka terpinggirkan, tentu harus dikoreksi. Kita tak boleh membiarkan keadilan lingkungan dan sosial dikorbankan demi pembangunan," pungkasnya. (\*)

Hilmy Muhammad Kritik Keras UU TNI:

# Ancaman Bagi Demokrasi dan Pembangunan Daerah

Rini Sumarni

Penulis

**A**nggota DPD RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Hilmy Muhammad, buka suara soal pengesahan UU TNI yang baru saja diketok DPR RI, Kamis (20/3/2025). Dalam pandangannya, revisi undang-undang ini bukan hanya melukai semangat reformasi, tapi juga membawa ancaman serius bagi demokrasi dan pembangunan daerah.

Menurut Hilmy, UU TNI justru mengaburkan batas antara ranah sipil dan militer. Ia khawatir, kehadiran militer dalam urusan pemerintahan sipil akan menggeser orientasi kebijakan dari kebutuhan masyarakat menuju pendekatan keamanan. “Kalau ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin daerah-daerah akan lebih banyak mengambil keputusan dengan pendekatan militer ketimbang kesejahteraan,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menyebut UU ini berpotensi membawa Indonesia kembali ke masa lalu, ke era Orde Baru, ketika militer terlibat aktif dalam pemerintahan melalui konsep Dwifungsi ABRI. “Kita sudah berjuang sejak reformasi 1998 untuk memisahkan militer dari poli-



Anggota DPD RI Hilmy Muhammad (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“**Kalau ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin daerah-daerah akan lebih banyak mengambil keputusan dengan pendekatan militer ketimbang kesejahteraan.**”

Anggota DPD RI,  
Hilmy Muhammad

tik dan pemerintahan. Tapi sekarang, seperti ingin diputar balik lagi,” tegas Hilmy.

Ia juga menyoroti dampak ekonomi dari regulasi ini. Menurutnya, anggaran pembangunan yang seharusnya dialokasikan untuk kesejahtera-

an rakyat bisa saja tersedot untuk urusan pertahanan dan keamanan. Akibatnya, rakyat kecil yang akan paling merasakan dampaknya.

Hilmy tidak menampik pentingnya menjaga nasionalisme dan kedaulatan. Namun, ia mengusulkan pendekatan yang lebih membangun, seperti pembinaan wawasan kebangsaan di tengah masyarakat sipil, bukan dengan memperluas peran militer dalam pemerintahan.

Meski UU telah disahkan, Hilmy mengajak semua pihak untuk terus mengawasi implementasinya. “Akademisi, masyarakat sipil, tokoh bangsa, mari kita kawal bersama. Jangan sampai UU ini malah membuka celah ketimpangan baru di daerah,” tutupnya. (\*)

# UU MHA Penting untuk Capai Kedaulatan Pangan



Anggota DPD RI Agustin Teras Narang (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

**Hestiana Kiftia Sari**

Penulis

**S**enator DPD RI asal Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, kembali menegaskan pentingnya pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA). Menurutnya, regulasi ini sangat mendesak bukan hanya untuk pengakuan, tetapi juga untuk perlindungan dan pemberdayaan komunitas adat yang selama ini menjadi penjaga kearifan lokal di berbagai penjuru Indonesia.

“RUU ini adalah perintah konstitusi. Masyarakat adat tidak cukup hanya dihormati, tapi juga harus dilindungi dan diberdayakan. Mereka bagian dari sejarah dan masa depan bangsa ini,” ujar Teras dalam sebuah diskusi daring bertema Nilai dan Praktik Hukum Adat untuk Me-

“**Bayangkan, wilayah adat yang nyata di lapangan justru sulit diakui karena dokumen dan sertifikatnya tidak sinkron.**”

**Anggota DPD RI,  
Agustin Teras Narang**

nyelamatkan Ekosistem dan Kedaulatan Pangan, Senin (17/3/2025).

Sebagai mantan Gubernur Kalimantan Tengah, Teras paham betul bagaimana masyarakat adat menjaga harmoni antara manusia dan alam. Mereka memiliki pengetahuan turun-temurun dalam mengelola hutan, tanah, dan air secara lestari. Sayangnya, keberadaan

mereka kerap terpinggirkan oleh proyek pembangunan atau konflik lahan yang tak kunjung selesai.

Padahal, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat telah dijamin UUD 1945, tepatnya dalam Pasal 18B. Bahkan di level internasional, Indonesia juga berperan aktif dalam deklarasi dan konvensi yang memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, seperti Konvensi ILO 169 dan Deklarasi PBB tahun 2007.

Teras juga menyoroti tumpang tindih data antar kementerian dan lembaga terkait masyarakat adat. Misalnya, data hutan adat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berbeda dengan yang dimiliki BPN atau Kementerian Pertanian. “Bayangkan, wilayah adat yang nyata di lapangan justru sulit diakui karena dokumen dan sertifikatnya tidak sinkron,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, ia mendorong agar RUU MHA segera disahkan menjadi undang-undang agar Indonesia memiliki satu pijakan hukum yang jelas dan berkeadilan bagi masyarakat adat. “Ini soal keadilan sosial, kelestarian lingkungan, dan masa depan bangsa,” pungkas Teras Narang. (\*)

Tamsil Linrung:

# Reformasi Polri Harus Meneladani Sosok Hoegeng

Adhi Nugroho

Penulis

**W**akil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, menyerukan pentingnya reformasi menyeluruh di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mengembalikan kepercayaan publik dan menjadikan institusi ini benar-benar profesional, independen, dan humanis. Ia menegaskan bahwa reformasi Polri idealnya berangkat dari semangat dan keteladanan sosok legendaris, Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso.

Dalam Seminar Nasional Reformasi Polri yang digelar di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Kamis (13/3/2025), Tamsil membagikan pengalaman pribadinya berinteraksi langsung dengan Hoegeng setelah masa pensiun sang jenderal. “Beliau adalah simbol keberanian dan integritas. Sosok yang tidak tergoda oleh kekuasaan dan tetap teguh dalam prinsip,” kenang Tamsil, yang mengenal Hoegeng saat sama-sama berada dalam Petisi 50.

Menurut senator asal Sulawesi Selatan itu, keteladanan Hoegeng adalah



Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung bersama Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

cermin ideal yang harus menjadi dasar dalam membenahi Polri hari ini. Reformasi tak cukup sekadar jargon, tetapi harus menyentuh aspek mendasar: tata kelola kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, serta penegakan kode etik yang tidak pandang bulu.

“Kita butuh polisi yang bukan hanya pintar dan terlatih, tetapi juga punya empati. Polri harus menjadi pelindung rakyat, bukan sumber ketakutan. Aparat yang memberi rasa aman, bukan justru terlibat dalam kejahatan,” ujarnya dengan tegas.

Tamsil mengingatkan bahwa reformasi 1998 per-

nah memberi amanat jelas: memisahkan Polri dari TNI agar kepolisian bisa bekerja tanpa intervensi kekuasaan dan kepentingan politik. Namun, berbagai peristiwa memalukan seperti kasus Ferdy Sambo hingga tragedi Kanjuruhan justru memperlihatkan sebaliknya bahwa reformasi masih jauh dari selesai.

“Masyarakat seharusnya merasa tenteram saat melihat polisi. Tapi sekarang, yang muncul justru kecemasan. Ini akibat ulah segelintir oknum yang merusak institusi dari dalam. Reformasi Polri adalah keharusan, bukan pilihan,” pungkas Tamsil Linrung. (\*)

# Arianto Kogoya Dorong Pasar bagi UMKM Papua Pegunungan

Arso P Nugroho

Penulis

**A**nggota DPD RI dari daerah pemilihan Papua Pegunungan, Arianto Kogoya, menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan nasib pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di wilayahnya. Dalam kegiatan serap aspirasi di Papua Pegunungan, Senin (24/3/2025), Arianto menemui langsung para perajin, mama-mama penjual hasil bumi, serta pelaku seni dan budaya yang selama ini berjibaku mempertahankan hidup lewat usaha mikro dan kerajinan tradisional.

Fokus utama dalam reses kali ini adalah isu ekonomi kreatif. Menurut Arianto, tantangan terbesar yang dihadapi oleh para pelaku UMKM di Papua Pegunungan bukanlah produksi, melainkan pemasaran. “Mereka punya kreativitas, punya keterampilan, tapi tak punya pasar. Noken yang dirajut dengan penuh ketekunan dan makna budaya, misalnya, sering kali hanya tersimpan karena tidak ada yang membeli,” ungkapnya prihatin.

Senator yang dikenal dekat dengan komunitas akar rumput ini berjanji akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, baik di



Anggota DPD RI Arianto Kogoya (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

tingkat provinsi maupun kabupaten, untuk mendorong penyediaan pasar yang representatif bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. “Tanpa dukungan konkret dari pemerintah daerah, ekonomi masyarakat asli Papua akan stagnan,” tegasnya.

Sebagai langkah nyata, Arianto mendorong agar dalam setiap kegiatan formal pemerintah daerah wajib melibatkan UMKM lokal, baik dalam penyediaan makanan maupun produk kerajinan. Dengan cara ini, ekonomi rakyat bisa digerakkan dari bawah, dan kebudayaan lokal pun ikut terangkat. “Bayangkan kalau setiap acara resmi diisi dengan makanan lokal dari

mama-mama penjual hasil bumi, itu bukan hanya soal ekonomi, tapi juga pelestarian budaya,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya mengangkat kuliner dan hasil kerajinan lokal sebagai bagian dari identitas Papua Pegunungan yang kaya dan unik. Tak hanya dikenal lewat tarian dan pakaian adat, tetapi juga dari rasa dan aroma masakan tradisional yang diwariskan turun-temurun.

“Papua Pegunungan tidak hanya kaya alamnya, tapi juga kaya rasanya. Kuliner harus menjadi jendela budaya yang memperkuat jati diri, sekaligus menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan bagi masyarakat kita,” pungkask Arianto Kogoya penuh harap. (\*)



# Sultan Minta Pemerintah RI Desak ICC Tangkap PM Israel

Lela Sadiyah

Penulis

**K**etua DPD RI Sultan B Najamudin mengutuk keras serangan brutal yang kembali dilancarkan Israel ke Jalur Gaza di tengah masa gencatan senjata. Ia mendesak Pemerintah Indonesia untuk tidak tinggal diam dan segera menyampaikan nota protes kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta mendorong pemberian sanksi tegas terhadap negara Zionis tersebut.

“Ini bukan lagi konflik. Ini adalah kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa dibenarkan oleh hukum internasional maupun nurani kemanusiaan mana pun,” tegas Sultan pada Rabu (19/3/2025). Ia menyampaikan keprihatinannya atas pembantaian terhadap masyarakat Gaza yang terjadi di bulan suci Ramadan.

Tragedi memilukan itu dilaporkan menewaskan lebih dari 400 warga sipil Palestina, termasuk anak-anak dan perempuan, setelah Israel melancarkan serangan besar-besaran pada 18 Maret 2025. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Kesehatan Palestina dan diberitakan oleh media internasional seperti Al Jazeera.

“Israel jelas-jelas melanggar kesepakatan gencatan senjata. Mereka tidak hanya ingkar, tapi juga sengaja menargetkan



Kondisi infrastruktur Jalur Gaza yang hancur akibat serangan Israel sejak 7 Oktober 2023. (Foto Antara/Anadolu)

“**Ini bukan lagi konflik. Ini adalah kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa dibenarkan oleh hukum internasional maupun nurani kemanusiaan mana pun.**”

**Ketua DPD RI Andi Sultan B Najamudin**

warga sipil yang tak berdosa. Ini adalah bentuk nyata genosida yang harus dihentikan,” ujar Sultan, mantan Wakil Gubernur Bengkulu yang kini memimpin lembaga tinggi negara yang merepresentasikan daerah-daerah di Indonesia.

Sultan mendesak pemerintah agar bersikap lebih tegas. Ia mendorong Indonesia untuk mendesak Mahkamah

Pidana Internasional (ICC) segera mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sebagai aktor utama di balik serangan berdarah ini.

Tak hanya itu, Sultan juga menuntut Dewan Keamanan PBB mengambil langkah nyata dengan memberikan sanksi internasional kepada Israel. “Embargo ekonomi dan pelarangan jual beli senjata harus segera dilakukan oleh negara-negara di dunia sebagai bentuk tekanan terhadap kebrutalan rezim Zionis ini,” tegasnya.

Dengan suara lantang, Sultan B Najamudin menegaskan bahwa pembelaan terhadap rakyat Palestina adalah pembelaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal. “Kita tidak boleh diam. Dunia harus bersatu menolak kejahatan ini,” pungkasnya. (\*)

# Azhari Kutuk Oknum TNI Pembunuh Warga Aceh



Senator Azhari Cage bersama ketiga anak almarhum yang masih kecil-kecil. (Foto Tim Ahari Cage)

**Adhi Nugroho**

Penulis

**D**uka dan amarah membalut Aceh Utara. Seorang agen mobil bernama Ns Hasfiani ditemukan tak bernyawa, tubuhnya dibuang di kawasan Gunung Salak, Aceh Utara. Pelakunya? Lagi-lagi oknum TNI Angkatan Laut. Belum usai kasus serupa di Tangerang, publik kembali dikejutkan dengan tragedi memilukan yang menggunakan nurani rakyat Aceh.

Senator DPD RI dari Aceh, Azhari Cage, menyampaikan kecaman keras. Ia menilai tindakan yang dilakukan pelaku tidak hanya kejam, tetapi juga membuka kembali luka lama rakyat Aceh yang pernah mengalami kekerasan serupa

semasa konflik dahulu. “Perbuatan ini sungguh biadab. Merebut harta korban, memasukkannya ke dalam karung, lalu membuangnya di Gunung Salak pada bulan Ramadan—ini benar-benar sangat terkutuk. Apakah sedemikian rendahnya nilai nyawa rakyat Aceh di mata TNI?” ujar Azhari dengan suara penuh emosi, Senin (17/3/2025).

Menurut Azhari, TNI seharusnya menjadi pelindung rakyat, bukan malah menjadi ancaman. Ia mengingatkan bahwa masyarakat sipil, apalagi seorang perempuan dan ibu dari tiga anak kecil, seharusnya mendapat perlindungan, bukan menjadi korban kebiadaban.

Tak hanya berhenti pada pernyataan, Azhari Cage

langsung mengunjungi rumah duka pada Kamis (21/3/2025) di Gampong Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Didampingi Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi Panyang, unsur Muspika, serta para ulama dan masyarakat setempat, Azhari menyampaikan belasungkawa mendalam dan menyuarakan harapan akan keadilan yang nyata.

Ia menuntut agar kasus ini diungkap secara transparan dan pelaku mendapat hukuman setimpal. “Saya minta Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk segera turun tangan. Ini bukan kasus pertama. Sudah terlalu sering perampasan kendaraan oleh oknum TNI AL terjadi. Perlu ada evaluasi besar-besaran terhadap penggunaan senjata oleh personil TNI. Jangan sampai rakyat kehilangan kepercayaan pada institusi pertahanan negara,” tandasnya.

Azhari menegaskan, Aceh bukan tanah tanpa hukum. Dan rakyat Aceh bukan warga kelas dua. “Keadilan harus ditegakkan. Kami tidak ingin melihat darah rakyat kami tertumpah lagi oleh tangan yang seharusnya menjaganya,” tegasnya menutup pernyataan. (\*)

# Sultan Minta Pemerintah Jadikan Guru di Daerah sebagai ASN

Theresia Oktavina

Penulis

**H**arapan baru menyelimuti dunia pendidikan Indonesia. Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menyerukan agar pemerintah terus memperjuangkan penetapan seluruh guru dan tenaga pendidikan di daerah sebagai aparatur sipil negara (ASN). Baginya, tidak ada alasan untuk membedakan tanggung jawab guru ASN dan non-ASN, karena keduanya memikul beban yang sama dalam membentuk generasi penerus bangsa.

“Dengan alokasi 20 persen dari APBN untuk pendidikan, sudah seharusnya negara menjamin kesejahteraan yang setara bagi seluruh guru. Karena kesejahteraan mereka adalah fondasi untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul,” tegas Sultan, Jumat (14/3/2025).

Meski demikian, Sultan mengingatkan pentingnya peningkatan kapasitas profesional guru, terutama bagi mereka yang masih menunggu pengangkatan sebagai ASN. Ia mengajak para guru untuk bersabar dan percaya pada komitmen Presiden dalam menempatkan kesejahteraan guru sebagai prioritas utama pembangunan manusia Indonesia.



Anggota DPD RI Tgk Ahmada MZ (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“**Ini menunjukkan bahwa Presiden benar-benar mendengarkan suara para pendidik. Guru adalah kunci utama dalam peningkatan kualitas pendidikan. Negara harus hadir untuk mereka.**”

Anggota I DPD RI, Tgk Ahmada MZ

Tak hanya berhenti di sana, Sultan juga menyambut baik langkah pemerintah yang mulai mentransfer tunjangan profesi guru (TPG) langsung ke rekening pribadi para guru. “Ini langkah yang konkret dan memudahkan. Guru jadi bisa fokus pada

tugasnya tanpa dibayangi kerumitan administrasi,” ujarnya.

Dukungan senada datang dari anggota DPD RI asal Aceh, Tgk Ahmada MZ. Ia menyebut kebijakan Presiden sebagai “kado indah menjelang Idulfitri” bagi para guru. “Ini menunjukkan bahwa Presiden benar-benar mendengarkan suara para pendidik. Guru adalah kunci utama dalam peningkatan kualitas pendidikan. Negara harus hadir untuk mereka,” kata Tgk Ahmada, Sabtu (15/3/2025).

Bagi DPD RI, perbaikan nasib guru bukan semata urusan administrasi, tapi soal masa depan bangsa. Karena di tangan merekalah, masa depan Indonesia digoreskan, huruf demi huruf, nilai demi nilai. (\*)

# Senator Ahmad Nawardi Dukung Pengembangan Pariwisata Madura



Anggota DPD RI Ahmad Nawardi sedang berada di Pulau Gili Labak. (Foto/Dok Pribadi)

**Mas Aryo Kristiyanto**

Penulis

Pulau Gili Labak, sebuah surga tersembunyi di pesisir timur Madura, Jawa Timur, baru-baru ini menarik perhatian anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Ahmad Nawardi. Pada Selasa (1/4/2025), Nawardi mengunjungi pulau kecil yang terletak di Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, untuk mengeksplorasi potensi pariwisata dan memberikan dukungan terhadap pengembangan sektor tersebut yang diharapkan dapat mendorong perekonomian lokal.

“Kunjungan saya ke Gili Labak membuka mata saya akan potensi luar biasa yang dimilikinya. Keindahan alam yang masih alami, pasir putih yang bersih, dan laut yang jernih membuat tempat ini sangat berpotensi menjadi destinasi wisata kelas dunia,” ungkap Nawardi, yang terpesona dengan suasana tenang dan alami pulau ini.

Anggota DPD RI asal Jawa Timur ini menekankan pentingnya pengelolaan yang tepat dan pengembangan infrastruktur yang memadai, seperti peningkatan aksesibilitas dan fasilitas umum. Hal ini diyakini akan mendukung sektor pariwisata

dan menarik lebih banyak wisatawan domestik maupun mancanegara.

Selama kunjungan, Nawardi juga menyempatkan diri berdialog langsung dengan para pelaku wisata lokal mengenai berbagai tantangan yang dihadapi, terutama dalam hal pengelolaan dan promosi pariwisata. “Kami berharap ada kolaborasi lebih erat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk memaksimalkan potensi wisata Gili Labak,” ujar Nawardi.

Pulau Gili Labak memang terkenal dengan keindahan alamnya yang memukau. Selain menawarkan aktivitas seperti *snorkeling* dan *diving*, pulau ini juga menyajikan suasana yang damai, cocok bagi wisatawan yang ingin melarikan diri dari hiruk-pikuk kota. Keunikan lainnya adalah keramahan komunitas lokal yang siap menyambut para pengunjung dengan tangan terbuka.

Dengan dukungan yang lebih besar dan kolaborasi yang lebih erat, Nawardi percaya Gili Labak bisa berkembang menjadi destinasi unggulan, yang tidak hanya mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat Sumenep, tetapi juga turut memperkaya pariwisata Indonesia. (\*)

# Anggota DPD RI Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran dan Anak Yatim

Nanda Russia Rola

Penulis

**A**nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terus aktif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di daerah pemilihan masing-masing selama bulan Maret 2025. Berbagai kegiatan dilakukan, mulai dari menyerap aspirasi masyarakat hingga memberikan bantuan sosial bagi warga yang terdampak bencana dan menggelar buka puasa bersama.

Salah satu anggota DPD RI yang turun langsung ke lapangan adalah Yulianus Henock dari daerah pemilihan Kalimantan Timur. Pada Minggu (30/3/2025), Henock memberikan bantuan kepada warga yang terdampak kebakaran di Kampung Sempatn, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat. Kebakaran yang melanda kampung ini pada 17 Maret 2025 menghancurkan 16 rumah warga dan 9 sarang walet, mengakibatkan 97 jiwa dari 28 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dan harta benda mereka. Meskipun tidak ada korban jiwa, kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai miliaran rupiah.

Henock yang berasal dari Kutai Barat, turut menyampaikan rasa prihatin dan berharap bantuan berupa sembako, pakaian, dan perlengkapan rumah tangga dapat membantu meringankan beban warga terdampak. “Bantuan ini adalah bentuk kepedulian saya sebagai Anggota DPD RI. Saya berharap dapat sedikit meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Sempatn,” ujar Henock.

Sementara itu, di Papua, Anggota DPD RI Sularso menggelar acara buka puasa bersama pada Minggu (23/3/2025) di Merauke. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan warga, Wakil Bupati Mappi Sanusi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat ini juga



Anggota DPD RI Yulianus Henock memberikan bantuan kepada warga yang terdampak kebakaran di Kampung Sempatn, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat. (Foto Tim Yulianus Henock)



Anggota DPD RI Sularso menyantuni anak yatim dalam kegiatan buka puasa bersama. (Foto Tim Sularso)

dilengkapi dengan pemberian santunan kepada 40 anak yatim piatu. Dalam kesempatan tersebut, Sularso menyampaikan bahwa buka puasa bersama merupakan sarana untuk mempererat silaturahmi dan menunjukkan rasa syukur atas berkat yang diberikan selama Ramadan.

“Tujuan dari buka puasa bersama ini adalah untuk meningkatkan silaturahmi dan memberikan manfaat bagi sesama. Semoga apa yang diberikan kepada anak yatim piatu ini dapat membawa keberkahan,” ungkap Sularso.

Kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh Anggota DPD RI ini mencerminkan dedikasi mereka dalam menjalankan amanah untuk melayani masyarakat, sekaligus mempererat hubungan dengan konstituen di daerah pemilihannya. (\*)

# Filep Desak Kapolri Usut Tuntas Kasus Asusila Oknum Kapolres NTT

Fandi Tri Prayogo

Penulis

**K**etua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Filep Wamafma, mendesak Kapolri untuk segera mengusut tuntas dugaan tindakan asusila terhadap anak yang dilakukan oleh oknum Kapolres di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kasus ini terungkap setelah sebuah video yang memperlihatkan tindakan tersebut bocor ke publik di Australia.

“Saya rasa, tindakan penonaktifan dari jabatan dan tugas Kapolres yang bersangkutan harus segera diikuti dengan tahapan hukum lain yang merupakan rangkaian proses hukum untuk mengusut tuntas kasus ini dan membawa terduga pelaku ke pengadilan hingga dijatuhi hukuman yang setimpal,” tegas Filep Wamafma, senator asal Papua Barat, Rabu (12/3/2025).

Menurut Filep, komitmen dan ketegasan Kapolri untuk melindungi hak-hak anak tidak cukup hanya dengan pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) di Bareskrim Polri pada tahun



Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

2024. “Operasionalisasi dari direktorat ini saat ini sangat dinanti untuk menunjukkan bahwa hukum tidak pandang bulu, tidak tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah, serta memastikan keadilan bagi korban dan pelaku,” tambahnya.

Filep juga menekankan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen untuk melindungi anak-anak melalui agenda pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJMN) 2024-2029. Salah satu indikator pencapaiannya adalah peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, yang berfokus pada pemenuhan hak anak dan perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi.

“Namun, di tengah upaya pemerintah menjamin perlindungan anak melalui regulasi dan kebijakan, kasus ini mencoreng wajah Indonesia di dunia internasional maupun nasional,” kata Filep.

Senator asal Papua Barat ini menegaskan bahwa DPD RI, melalui Komite III yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, akan mengawal proses hukum ini untuk memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. “Permasalahan perlindungan anak menjadi isu reses yang kami angkat pada masa reses periode Maret-April ini,” ungkapnya. (\*)

# Pemerintah Harus Tegas Soal Pemindahan Pusat Pemerintahan



Anggota DPD RI Aji Mirni Mawarni (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

**Helena AF Ojan**

Penulis

**P**embangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini berada pada posisi dilematis. Di satu sisi, keberlanjutan pembangunan membutuhkan anggaran sangat besar di tengah kondisi defisit anggaran dan kebijakan efisiensi besar-besaran oleh pemerintah pusat. Di sisi lain, jika proyek ini dihentikan, maka infrastruktur yang telah dibangun dengan dana puluhan triliun rupiah berisiko mangkrak.

“Dalam situasi ini, sangat dibutuhkan kejelasan dan ketegasan pemerintah. Kapan pusat pemerintahan dipindahkan ke IKN? Kapan roda pemerintahan mulai berjalan di Kota Nusantara dan bagaimana strategi

“**Diduga kuat hal ini terjadi akibat praktik prostitusi yang mulai marak.**”

**Anggota DPD RI,  
Aji Mirni Mawarni**

penganggaran untuk segera menyelesaikan pembangunan IKN?” tanya anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Kalimantan Timur, Aji Mirni Mawarni, baru-baru ini.

Aji Mirni mengungkapkan, di tengah berbagai dinamika pembangunan, dampak sosial di sekitar kawasan IKN mulai terasa. Hal ini terungkap dari diskusinya bersama Dinas Sosial Kaltim dan Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC

PPA).

Salah satu temuan yang mencemaskan adalah peningkatan jumlah penderita HIV/AIDS di sekitar kawasan IKN, terutama dari kalangan anak muda. “Diduga kuat hal ini terjadi akibat praktik prostitusi yang mulai marak,” ungkapnya.

Selain itu, ia mencatat peningkatan jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), terutama dari kalangan pendatang yang datang dengan harapan memperoleh pekerjaan namun tidak mendapatkannya. “Sekitar 200-an ODGJ sudah dipulangkan ke daerah asalnya,” kata Aji Mirni.

Ia juga mengingatkan potensi masalah sosial lainnya, yakni terkait aparatur sipil negara (ASN) yang pindah ke IKN tanpa membawa keluarga. Menurutnya, kondisi ini rentan menimbulkan masalah rumah tangga, termasuk perselingkuhan, yang dapat berpengaruh pada kinerja pegawai. “Alih-alih mengharapkin kinerja baik, justru kondisi sebaliknya yang terjadi akibat hancurnya tatanan keluarga,” ujar dia.

Senator Aji Mirni menegaskan bahwa persoalan-persoalan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, seiring dengan percepatan pembangunan IKN. (\*)

# Senator Fahira Idris Dukung Kebijakan Tanpa Operasi Yustisi

M. Fathoni

Penulis

**A**nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Daerah Khusus Jakarta, Fahira Idris, menyambut baik kebijakan Gubernur Jakarta Pramono Anung yang tidak akan menggelar operasi yustisi bagi pendatang pasca-Lebaran 2025. Kebijakan ini melanjutkan pendekatan serupa yang pernah diterapkan oleh Gubernur sebelumnya, Anies Baswedan.

Menurut Fahira, langkah tersebut mencerminkan prinsip bahwa Jakarta adalah milik seluruh rakyat Indonesia. “Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berusaha dan berkembang di Jakarta. Jakarta harus terus menjadi kota yang inklusif, kota modern yang dapat diakses dan dihuni oleh siapa pun tanpa diskriminasi,” ujar Fahira, Jumat (4/4/2025).

Ia menegaskan bahwa Jakarta harus menjadi kota yang menghargai seluruh warganya secara setara. Oleh karena itu, setiap orang perlu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan.

Agar kebijakan ini berjalan efektif dan berdampak positif, menurut Fahira, pemerintah perlu menetapkan aturan pendukung yang jelas, salah satunya adalah kewajiban memiliki



Anggota DPD RI Fahira Idris (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“**Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berusaha dan berkembang di Jakarta. Jakarta harus terus menjadi kota yang inklusif, kota modern yang dapat diakses dan dihuni oleh siapa pun tanpa diskriminasi.**”

Anggota DPD RI,  
Fahira Idris

kartu identitas resmi seperti KTP bagi para pendatang.

“Identitas resmi sangat penting agar para pendatang bisa mengakses layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum. Dengan memiliki identitas yang jelas,

mereka akan lebih mudah mencari pekerjaan, mengakses layanan kesehatan, hingga mengikuti berbagai program pelatihan kerja dari pemerintah maupun sektor swasta,” imbuhnya.

Fahira menilai, pendekatan ini merupakan solusi konkret dalam menghadapi tantangan urbanisasi, termasuk pengangguran dan ketimpangan sosial. Selain itu, data kependudukan yang akurat juga akan membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan dan merancang program pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

“Dengan begitu, pendatang lebih siap bersaing di pasar tenaga kerja yang semakin ketat. Keterampilan adalah kunci utama agar pendatang bisa bertahan dan berkembang di Jakarta,” pungkas Fahira. (\*)



# Dukung Program Sekolah Rakyat, Senator Ingatkan Potensi Diskriminasi



Anggota DPD RI Lia Istifhama (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

**Rini Sumarni**

Penulis

**A**nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menyatakan dukungannya terhadap langkah cepat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam mengimplementasikan Program Sekolah Rakyat (SR), salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini dinilai sebagai solusi jangka panjang dalam upaya pemerataan akses pendidikan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat miskin ekstrem.

“Program Sekolah Rakyat sebagai inovasi Pemerintahan Presiden Prabowo

Subianto patut diapresiasi karena digagas sebagai bentuk kesetaraan pendidikan bagi siswa yang berada pada situasi sosial ekonomi kemiskinan ekstrem,” ujar Lia, baru-baru ini.

Senator yang akrab disapa Ning Lia ini menekankan bahwa Program Sekolah Rakyat penting untuk memastikan pendidikan berkualitas dapat dinikmati semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Ia menilai konsep SR yang tidak mengarah pada pendidikan vokasional, tetapi ditujukan untuk mempersiapkan siswa melanjutkan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi, sebagai langkah maju yang patut didukung.

Namun, Lia juga memberikan catatan penting

terkait sistem kelulusan dan pengakuan ijazah dari Sekolah Rakyat. Ia mengingatkan agar tidak muncul diskriminasi, baik dalam penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi maupun di dunia kerja.

“Jangan sampai lulusan Sekolah Rakyat dianggap tidak memiliki keterampilan atau kualitas yang setara dengan sekolah lain. Mereka bukan sekolah karena tidak mampu, tapi karena mereka adalah siswa pilihan yang bersekolah karena memiliki hak dan potensi besar untuk bangsa ini,” tegasnya.

Lia juga menyoroti konsep Sekolah Rakyat sebagai sekolah berasrama (*boarding school*) yang diyakininya mampu memperkuat ikatan sosial antar siswa. Dalam pandangannya, siswa dari latar belakang ekonomi serupa akan saling mendukung dan membangun solidaritas yang kuat.

“Dengan konsep *boarding school*, diharapkan terbentuk modal sosial yang erat antar siswa. Ini akan menjadi investasi jangka panjang berupa persahabatan dan solidaritas yang akan menguatkan mereka di tengah berbagai keterbatasan,” pungkasnya. (\*)

# SIDPUR KE-11 TAHUN 2024-2025 DPD RI SAHKAN 10 KEPUTUSAN

Theresia Oktavina

Penulis

**D**alam Sidang Paripurna ke-11 Tahun Sidang 2024-2025 yang dipimpin Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin, Jumat (14/3/2025), menyepakati dan mengesahkan 10 keputusan. Keputusan tersebut merupakan hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing alat kelengkapan (alkel) DPD RI.

Di antara keputusan tersebut adalah hasil pengawasan Komite I DPD RI terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, Komite I juga menyampaikan hasil pengawasan terkait pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2024 dan pelaksanaan program Reforma Agraria dan Konflik Pertanahan di Daerah.

Komite II DPD RI menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi dan hasil pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perkebunan.

Komite II juga menyampaikan Pandangan dan Pendapat DPD RI terkait Rancangan Undang-Undang Perubahan Ke-3 atas Un-



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin didampingi para Wakil Ketua DPD RI memimpin Sidang Paripurna ke-11 Tahun Sidang 2024-2025. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

dang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Komite IV DPD RI menyampaikan hasil pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah disepakati menjadi keputusan DPD RI pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2024-2025.

Sidang Paripurna DPD RI juga mengesahkan hasil pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa yang disampaikan

oleh Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD). Sementara itu Badan Akuntabilitas Publik (BAP) menyampaikan Hasil Pengawasan atas Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2024 BPK RI terkait Indikasi Keuangan Negara untuk dijadikan Keputusan DPD RI.

“Pimpinan DPD RI memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja seluruh Alat Kelengkapan yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana program prioritas yang telah ditetapkan pada Masa Sidang ini,” pungkas Sultan B. Najamudin setelah semua Alat Kelengkapan menyampaikan laporan pelaksanaan kerjanya. (\*)

# Anggota DPD RI Lakukan Pengawasan Selama Lebaran

Mas Aryo Kristiyanto

Penulis

Setiap Ramadan dan menjelang Hari Raya Idulfitri, harga bahan kebutuhan pokok selalu mengalami kenaikan. Karena itu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok serta memberikan dukungan kelancaran arus mudik dan balik selama libur Lebaran 2025.

“Tak dapat dipungkiri, setiap pelaksanaan Ramadan dan menjelang Idulfitri, harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Oleh karena itu, pemerintah bertugas untuk mengantisipasi kenaikan harga dan menjamin ketersediaan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat,” kata Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin dalam Sidang Paripurna DPD RI, Jumat (14/3/25).

Karena itu, dia mengingatkan semua anggota DPD RI sebelum kembali ke daerah masing-masing, beberapa catatan terhadap persoalan serta permasalahan bangsa yang sedang terjadi saat ini. Salah satunya fenomena kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang libur lebaran tahun ini. “Kami berharap anggota DPD RI dapat



Pembukaan Sidang Paripurna DPD RI diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

melakukan tugas pengawasan dengan baik di daerahnya,” ujar Sultan.

Selain itu, Sultan juga meminta pemerintah untuk menyiapkan berbagai bentuk dukungan untuk menjamin kelancaran sarana dan prasarana jalan menjelang libur Idul Fitri tahun ini. Dia meminta Komite II DPD RI untuk dapat mengawal dan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok serta memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik lebaran tahun 2025 ini.

Selain kebutuhan bahan pokok, DPD RI juga menekankan bahwa pemerintah harus memastikan ketersediaan bahan bakar minyak

(BBM), sarana transportasi yang memadai, rekayasa lalu lintas, perbaikan infrastruktur penunjang dan berbagai dukungan komprehensif lainnya selama arus mudik dan balik Lebaran 2025.

Sidang paripurna DPD RI juga menyikapi secara serius bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah beberapa waktu lalu. Hal ini dibuktikan dengan membentuk *task force* bantuan korban bencana alam yang dipimpin Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas. “Hasil sidang paripurna menyepakati iuran dana bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam yang rutin setiap bulan yang berasal dari gaji anggota DPD RI,” tambah Sultan. (\*)

# Di-PHK Pihak Kemendes TPP Desa Mengadu ke DPD RI

Nanda Russia Rola

Penulis

**K**omite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menerima audiensi perwakilan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa Jum'at (14/3/2025). Mereka mengadu karena telah dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).

Dalam rapat audiensi tersebut, mereka diterima Ketua Komite I Andi Sofyan Hasdam dan para Wakil Ketua Komite I Carol Simon Petrus, Bahar Buasan dan Muhdi. Sedangkan dari perwakilan TPP Desa adalah Kandidatus Angge dari Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Fety Anggrani Dewi dari Sumatera Barat.

Kandidatus Angge menyampaikan bahwa kehadiran mereka mewakili 1.040 TPP dari 37 provinsi di Indonesia. Mereka menyampaikan bahwa tanggal 16 Januari 2025 menerima Surat Keputusan Kemendes PDT untuk dikontrak kembali hingga 31 Desember 2025. Atas dasar itu, para TPP Desa kembali bekerja sesuai tugasnya.

Namun pada Maret



Kantor Kemendes PDT

2025, Kemendes-PDT menyatakan tidak memperpanjang kontrak TPP Desa yang pernah maju mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI, DPD RI dan DPRD pada Pemilu 2024 lalu. Bahkan gaji mereka yang sudah bekerja dari Januari hingga Februari tidak dibayarkan. Padahal, pada 27 Juli 2023 Kemendes menerbitkan surat edaran ke KPU pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang menyatakan pendamping desa tidak wajib mundur atau cuti sesuai UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

“Atas dasar surat Kemendes itu, kami pun mencalonkan diri pada

Pemilu 2024. Atas kondisi saat ini, kami sangat berkeberatan. Untuk itu, kami mohon bantuan DPD RI, karena walaupun peraturan baru Kemendes diberlakukan seharusnya tidak berlaku surut kebelakang,” ujar Kandidatus Angge.

Fety Anggrani Dewi menyebut jika audiensi telah mereka lakukan dengan Kemendes PDT, namun tidak ada titik temu. Mereka juga sudah melaporkan masalah yang mereka hadapi ke Ombudsman serta audiensi dengan Komisi V DPR RI tapi kurang mendapat dukungan. “Karena itu, DPD RI menjadi harapan kami,” kata Fety. (\*)



# Komite I DPD RI Dukung Kontrak TPP Desa Dilanjutkan

Fandi Tri Prayogo

Penulis

**K**etua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Andi Sofyan Hasdam menyampaikan komitmen untuk membantu mengupayakan solusi dan jalan keluar terhadap masalah yang dialami Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa yang di-PHK secara sepihak oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).

“Kita berkomitmen untuk membantu atas masalah yang dihadapi para TPP Desa. Selain dengan Kemendes PDT, kita akan memanfaatkan seluruh jalur yang ada bagi penyelesaian masalah ini,” kata Andi Sofyan Hasdam, ketika menerima audiensi perwakilan dari TPP Desa, Jumat (14/3/2025).

Anggota Komite I DPD RI Sudirman Haji Uma, menyampaikan bahwa kebijakan Kemendes PDT tidak manusiawi dan juga melanggar aturan. Senator dari daerah pemilihan Aceh itu juga mendesak Kemendes PDT agar hak TPP Desa dibayarkan, apalagi ini dalam suasana Ramadan dan menjelang lebaran Idulfitri.

“Ini tidak manusiawi dan ada pelanggaran aturan oleh



Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“**Kita berkomitmen untuk membantu atas masalah yang dihadapi para TPP Desa. Selain dengan Kemendes PDT, kita akan memanfaatkan seluruh jalur yang ada bagi penyelesaian masalah ini.**”

**Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam**

Kemendes PDT karena tidak bisa diberlakukan surut ke belakang. Hak mereka yang telah bekerja 2 bulan di 2025 juga harus dibayarkan. Apalagi saat ini dalam suasana Ramadan dan tidak lama lagi hari raya Idulfitri,” kata Haji Uma.

Haji Uma juga meminta Komite I DPD RI bersepakat mengeluarkan rekomendasi untuk mengundang Kemendes PDT untuk rapat kerja dan menjelaskan masalah ini. Haji Uma juga berharap Kemendes PDT melakukan evaluasi terhadap keputusan terkait PHK sepihak TPP Desa.

Dari hasil audiensi tersebut, Komite I DPD RI mengeluarkan kesimpulan antara lain akan mendukung aspirasi perwakilan 1.040 TPP Desa di seluruh Indonesia untuk diperpanjang kontraknya di tahun 2025. Komite I DPD RI akan membahas masalah ini dengan Kemendes PDT pada sidang ke depan setelah selesai masa reses. (\*)

# Gaji TPP Desa Sudah Dibayar Haji Uma Minta Terus Bekerja

M. Fathoni

Penulis

**A**nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sudirman atau Haji Uma kembali menerima audiensi Pendamping Desa, di kediamannya, Alue Awee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh, Jumat (28/3/2025). Pertemuan ini merupakan yang ketiga kalinya setelah perwakilan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) mengadu ke Komite I DPD RI, Jumat (14/3/2025).

Dalam audiensi tersebut, hadir pula TPP dari Bireuen dan Aceh Tengah. Mereka adalah tenaga pendamping desa yang terancam diberhentikan sepihak oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal. Dalam diskusi yang berlangsung, para TPP kembali menyampaikan keresahan mereka terkait ancaman pemecatan yang dilakukan Kemendes PDT.

Alwin, salah satu TPP dari Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, melaporkan bahwa advokasi yang dilakukan Haji Uma bersama lembaga DPD RI, telah menunjukkan perkembangan positif. "Alhamdulillah, pihak Kemendes PDT sudah mulai melunak. Setidaknya,



Anggota DPD RI Sudirman atau Haji Uma saat menerima audiensi TPP Desa di kediamannya. (Foto Tim Haji Uma)

“Sejauh ini, belum ada pemberitahuan resmi terkait ancaman pemecatan. Jadi, abaikan saja dan teruslah bekerja dengan baik.”

Anggota Komite I DPD RI,  
Sudirman

gaji kami untuk Januari dan Februari sudah dibayarkan,” ungkap Alwin.

Namun, dua hari sebelum pencairan gaji tersebut, beredar pesan WhatsApp berjenjang yang meminta para TPP segera mengundurkan diri. Alwin menegaskan bahwa pesan itu bukan berasal dari sumber resmi Kemendes PDT dan menganggapnya sebagai hoaks. “Itu hanya pesan dari oknum pimpinan yang tidak bertanggung jawab,”

lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut, Haji Uma menegaskan dan meminta para TPP agar tetap bekerja seperti biasa dalam mendampingi pemerintah desa dan masyarakat. “Sejauh ini, belum ada pemberitahuan resmi terkait ancaman pemecatan. Jadi, abaikan saja dan teruslah bekerja dengan baik,” kata Haji Uma.

Haji Uma menyampaikan bahwa setelah masa reses selesai, Komite I DPD RI akan bertemu dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, untuk mempertanyakan permasalahan ini. Selain membahas permasalahan TPP, Haji Uma juga menegaskan bahwa DPD RI terus mendukung program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (\*)



# BAP DPD RI Desak Kementerian ATR/BPN Selesaikan Konflik Agraria di Daerah

Betria Eriani

Penulis

**B**adan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk segera menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di beberapa daerah. Desakan tersebut disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat ke BAP DPD RI yang didominasi masalah pertanahan.

“BAP DPD RI sangat *concern* terhadap penanganan konflik agraria yang melibatkan pihak pemerintah dan masyarakat. Mengingat urgensi dan banyaknya aduan masuk terkait konflik agraria, kami mendesak pemerintah segera menyelesaikan permasalahan tersebut,” kata Wakil Ketua BAP DPD RI, Yulianus Henock Sumual di Gedung DPD RI, Rabu (12/3/2025).

Wakil Ketua II BAP DPD RI Ahmad Syauqi Soeratno, mempertanyakan aduan masyarakat atas kasus kelalaian hilangnya sertifikat asli di Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke. Setelah sertifikat yang hilang dibuat kembali, terdapat permasalahan baru yakni terdapat



Pimpinan dan anggota BAP DPD RI bersama pejabat Kementerian ATR/BPN usai mengadakan Rapat Dengar Pendapat. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

selisih luas tanah antara luas tanah di sertifikat lama yang hilang dengan luas di sertifikat baru.

Ketua BAP DPD RI Abdul Hakim meminta agar Kementerian ATR/BPN menanggapi permohonan perpanjangan Surat Hak Guna Usaha (SHGU) PT. Socfindo Tanah Gambus sebelum konflik dengan masyarakat Desa Simpang Gambus, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara terselesaikan.

Abdul Hakim juga meminta agar pihak Kementerian ATR/BPN segera menyelesaikan pengaduan masyarakat di Provinsi Bengkulu. “Kami minta Kementerian ATR/BPN untuk menjembatani permohonan ganti rugi tanah dan tanaman masyarakat desa Semundam, Kabupaten Muko-Muko yang dirampas dan diusir paksa oleh perusahaan,” pungkas Abdul Hakim.

Menanggapi permasalahan tersebut, Direktur Penanganan Sengketa Pertanahan Kementerian ATR/BPN Eko

Priyanggodo mengaku dirinya belum mendapat informasi mengenai hilangnya sertifikat tanah P-98 di Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke. “Mengenai perbedaan luas, kami informasikan bahwa ini terkait masalah administrasi pertanahan. Saat ini sudah terbit Peta Bidang Tanah (PBT) dan sudah ada surat pernyataan dari Universitas Musamus yang telah menerima hasil pengukuran ulang tersebut,” ujar Eko.

Direktur Penanganan Perkara Pertanahan Kementerian ATR/BPN Joko Subagyo menjelaskan bahwa pihaknya belum menerima penyampaian keberatan untuk kasus lahan masyarakat Kabupaten Muko-Muko. Sementara itu untuk pengaduan masyarakat Desa Simpang Gambus masih dalam tahap penelitian. “Jika dari hasil penelitian nanti kami tidak menemukan permasalahan, maka lahan tersebut masih masuk ke wilayah PT. Socfindo lahan Gambus,” ucap Joko. (\*)

# Pemerintah Harus Perhatikan Kesejahteraan Perangkat Desa

Arso P Nugroho

Penulis

**A**nggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Aceh Sudirman atau Haji Uma menilai bahwa terdapat sejumlah masalah yang menjadi perhatian dalam tata laksana pemerintah desa serta pelaksanaan dana desa di Aceh dan daerah lainnya di Indonesia. Sejumlah masalah tersebut antara lain terkait dengan kesejahteraan perangkat desa dan tumpang tindihnya aturan teknis tata laksana dana desa yang diterbitkan oleh lintas kementerian terkait.

Pandangan tersebut disampaikan oleh Haji Uma dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) Yogyakarta Sutoro Eko Yunanto, di Gedung DPD RI, Senin (3/3/2025).

Menurut Haji Uma, penghasilan tetap atau siltap aparatur desa satu sisi telah diatur nilainya dalam Undang-Undang (UU) tentang Desa, peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Namun implementasinya jauh dari harapan karena selanjutnya diatur dengan peraturan bu-



Anggota Komite I DPD RI Sudirman atau Haji Uma. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“**Realita di lapangan membuat kita miris. Di Aceh misalnya, ada gaji aparatur desa yang dirapel per tiga bulan. Bahkan ada daerah yang pembayaran siltap aparatur desanya tertunda hingga enam bulan. Jadi, bayangkan bagaimana kita menuntut kinerja optimal aparatur desa jika kesejahteraan mereka terabaikan.**”

**Anggota Komite I DPD RI,  
Sudirman**

pati (perbup).

“Realita di lapangan membuat kita miris. Di Aceh misalnya, ada gaji aparatur desa yang dirapel per tiga bulan.

Bahkan ada daerah yang pembayaran siltap aparatur desanya tertunda hingga enam bulan. Jadi, bayangkan bagaimana kita menuntut kinerja optimal aparatur desa jika kesejahteraan mereka terabaikan,” ujar Haji Uma.

Selain itu, Haji Uma juga menyorot aturan teknis lintas kementerian yang tumpang tindih dan banyaknya aplikasi yang harus dikerjakan aparatur desa yang mestinya bisa diintegrasikan dan disinkronisasi, yang berpotensi mempengaruhi proses kerja aparatur desa di lapangan.

Haji Uma berharap sejumlah persoalan tersebut harus menjadi bahan kajian dan evaluasi pemerintah ke depannya, sehingga tata laksana pemerintahan desa serta pelaksanaan dana desa lebih optimal dan mencapai tujuan sebagaimana diharapkan. (\*)



# BAP DPD RI Mediasi Konflik Agraria dan Pensiunan BRI



BAP DPD RI saat Rapat Dengar Pendapat dengan kementerian/lembaga terkait dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

**Hestiana Kiftia Sari**

Penulis

**B**adan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait permasalahan lahan yang masuk wilayah Hak Guna Usaha PTPN XIV dan PT Sinergi Perkebunan Nusantara di Provinsi Sulawesi Tengah, serta Pengaduan dari Paguyuban Pensiunan BRI dengan mengundang kementerian dan lembaga yang memiliki wewenang dalam mengambil keputusan strategis dalam upaya penyelesaian permasalahan masyarakat sesuai peraturan yang berlaku.

“Kami telah menerima pengaduan masyarakat dan pemerintah daerah, berkaitan dengan kepentingan daerah termasuk pengaduan atas kinerja akuntabilitas publik

instansi pemerintah yang terindikasi adanya tindak korupsi, penyimpangan dan maladministrasi,” kata Wakil Ketua BAP DPD RI Yulianus Henock Sumual, dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian, Rabu (5/3/25).

Dia mengingatkan bahwa kepatuhan dan penghormatan kepada sistem hukum dan perundang-undangan merupakan unsur yang tidak terpisahkan dalam membangun dan mewujudkan ketahanan nasional. Kepatuhan pada sistem hukum dan perundang-undangan akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terjaganya ketertiban umum dan menjadikan kinerja perekonomian negara selalu produktif.

Anggota DPD RI asal

Provinsi Sumatera Utara Penrad Siagian mengatakan setiap daerah di republik ini pasti memiliki masalah dengan PTPN seperti lahan atau perizinan. Ke depan, BAP DPD RI harus memiliki kelompok kerja yang fokus setiap ada pengaduan masyarakat sehingga bisa terselesaikan dengan baik.

“Kita harus mengubah mekanisme kerja BAP DPD RI, sehingga ketika selesai rapat urusan permasalahan masyarakat sudah *clear*. Kita juga tahu bahwa kasus yang bersinggungan dengan PTPN sangat banyak apalagi ada yang sudah bertahun-tahun, maka kita perlu bentuk kelompok kerja sehingga bisa fokus setiap ada pengaduan masyarakat,” terang Penrad.

Anggota DPD RI asal Provinsi Sulawesi Tengah Febriyanthi Hongkiriwang optimis BAP DPD RI bisa segera menyelesaikan permasalahan atau menemukan titik temu dari pengaduan masyarakat. Karena tidak sedikit masyarakat yang menantikan hasil rapat kerja BAP DPD RI. “Kita memang tidak bisa memutuskan, tapi hanya menjembatani atau memfasilitasi. Namun begitu banyak masyarakat daerah yang mengadu ke BAP dan mengharapkan jalan keluar,” tutur Febriyanthi. (\*)

# Perlindungan Masyarakat Adat Perlu Diatur dalam Regulasi Nasional

Betria Eriani

Penulis

**B**adan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menegaskan pentingnya perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam sistem regulasi nasional dan daerah. Masyarakat hukum adat memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi, tetapi dalam implementasinya masih banyak kendala yang harus dihadapi.

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur UUD 1945. “Namun, di lapangan, banyak hak-hak masyarakat adat yang masih terabaikan akibat lemahnya regulasi daerah serta minimnya pengakuan formal terhadap komunitas adat,” Ketua BULD DPD RI Stefanus BAN Liow dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pakar, Selasa (5/3/2025).

Deputi Bidang Politik dan Hukum Aliansi Masyarakat Hukum Adat Nusantara (AMAN) Erasmus Cahyadi mengatakan bahwa di berbagai daerah, dalam perumusan perda, kurang melibatkan



Pimpinan dan anggota BULD DPD RI bersama pakar usai membahas terkait perlindungan masyarakat hukum adat. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

partisipasi masyarakat adat. Ketika draf perda dikonsultasikan ke Kementerian Hukum, draf perda tersebut berubah signifikan dari rumusan awalnya. Sehingga masyarakat adat yang awalnya menjadi inisiator justru menolak.

Dosen Hukum Adat dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Sartika Intaning Pradhani menjelaskan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dibutuhkan sosialisasi tentang keberfungsian hukum adat dalam perda maupun UU Masyarakat Hukum Adat. Pemerintah juga harus memastikan bahwa hukum dapat menyediakan keadilan yang substantif.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember Dominikus Rato meminta BULD

DPD RI agar dapat menjembatani masalah perundang-undangan ini. “Kami mengharapkan DPD RI dapat menjadi jembatan agar setiap perda dan UU yang terbit tidak berbenturan dengan hukum dan dapat berjalan harmonis,” ujar Dominikus.

Joeni Arianto Kurniawan dari Center of Legal Pluralism Studies (CLeP) Fakultas Hukum Universitas Airlangga mengatakan bahwa masyarakat harus dapat memiliki akses dalam penyusunan perda oleh DPRD. Dalam penyusunan Perda, Joeni menilai hal tersebut didasarkan pada agenda politik yang terdapat di DPRD. Sehingga dalam merumuskan perda terkait masyarakat hukum adat, harus menunggu *political will*. (\*)

# BKSP dan Kedubes Kanada Bahas Perubahan Iklim

Arso P Nugroho

Penulis

**B**adan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar pertemuan dengan Kedutaan Besar Kanada dalam rangka memperkuat hubungan bilateral di bidang transisi energi dan perubahan iklim. Rapat yang berlangsung di Gedung DPD RI ini, Jumat (7/3/2025) menjadi forum diskusi strategis antara kedua negara untuk membahas tantangan dan peluang dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Dalam pertemuan ini, BKSP DPD RI menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Kanada dalam mendukung mitigasi perubahan iklim serta upaya transisi energi di Indonesia. Gusti Farid Hasan Aman menegaskan bahwa kerja sama dengan Kanada sangat strategis dalam mempercepat pencapaian target energi hijau Indonesia. Ia juga menekankan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan memperluas penggunaan energi terbarukan sesuai dengan kebijakan nasional.

*Head of Development Cooperation/Counsellor (Development)* Kedutaan Besar



Pertemuan BKSP DPD RI dengan Kedutaan Besar Kanada. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Kanada Mr. Kevin Tokar menjelaskan bahwa Kanada telah lama menjadikan perubahan iklim sebagai prioritas nasional, dengan berbagai kebijakan dan investasi yang mendukung percepatan transisi energi.

Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah pengalokasian lebih dari 160 miliar dolar Kanada untuk mendukung pengembangan energi bersih serta infrastruktur rendah karbon. Selain itu, Kanada juga memiliki target mencapai jaringan listrik nol emisi pada tahun 2035, dengan 85 persen energinya berasal dari sumber terbarukan seperti tenaga air, angin, matahari, dan nuklir.

Sebagai tindak lanjut dari diskusi tersebut, BKSP DPD RI menyampaikan beberapa usulan kolaborasi. *Pertama*, peningkatan kolaborasi

dalam pendanaan hijau, melalui kerja sama dengan lembaga keuangan Kanada untuk mendukung proyek-proyek energi hijau di Indonesia. *Kedua*, transfer teknologi energi bersih, terutama dalam pengembangan tenaga nuklir dan hidrogen hijau sebagai bagian dari bauran energi nasional Indonesia. *Ketiga*, penyelarasan kebijakan energi, dengan mengadopsi praktik terbaik dari Kanada dalam pengelolaan transisi energi dan mitigasi perubahan iklim.

“Kami berharap hasil dari diskusi ini dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan konkret yang menguntungkan kedua negara. Indonesia dan Kanada memiliki potensi besar untuk bekerja sama dalam membangun masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan,” Ketua BKSP. (\*)

# Komite III Minta Kemensos Lakukan Transformasi Sosial

Theresia Oktavina

Penulis

**K**omite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengajak Kementerian Sosial (Kemensos) dan elemen masyarakat mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Untuk mengatasi masalah sosial tersebut dibutuhkan keterlibatan seluruh *stakeholder* untuk melakukan transformasi sosial.

“Transformasi sosial merupakan upaya menyeluruh yang dilakukan, tidak hanya oleh Kementerian Sosial tapi juga dibutuhkan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial ini,” kata Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Sosial, di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (10/3/25).

Filep mengakui berbagai permasalahan sosial yang sangat kompleks masih kerap terjadi di tengah masyarakat salah satunya judi *online* (judol), pinjaman *online* (pinjol) serta penyalahgunaan penggalangan donasi. Ketiganya merupakan dampak negatif dari kemajuan teknologi yang ada saat ini.



Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma dan Sekjen Kementerian Sosial Robben Rico menandatangani kesimpulan rapat. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Khusus untuk judol dan pinjol, kedua praktik ini tidak hanya memberikan dampak finansial, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan sosial yang kompleks. Judol dan pinjol menciptakan kecanduan, kerusakan hubungan sosial, menjerat masyarakat dalam lingkaran utang dan menimbulkan tekanan psikologis akibat metode penagihan yang tidak manusiawi.

Anggota DPD RI asal Provinsi Papua Barat Daya Hartono mendukung program Kemensos mengenai Sekolah Rakyat. Menurutnya program sekolah rakyat sangat dinantikan oleh masyarakat khususnya di Papua Barat Daya. “Kami sangat mendukung

adanya program sekolah rakyat, karena program ini sangat bermanfaat untuk masyarakat di Papua Barat Daya,” tuturnya.

Anggota DPD RI asal Provinsi Papua Pegunungan Arianto Kogoya mendesak agar Kemensos memperhatikan anak-anak jalanan yang putus sekolah. Maka pada kesempatan ini, ia berharap Kemensos dibuatkan rumah pembinaan agar anak-anak ini bisa dibina dan bersekolah. “Ini permasalahan yang harus segera diselesaikan, banyak anak-anak jalanan yang putus sekolah. Untuk itu Kemensos harus bisa membuat rumah pembinaan agar anak-anak ini bisa bersekolah lagi,” tukasnya. (\*)

# DPD RI Minta OJK Perkuat Pengawasan

Hestiana Kiftia Sari

Penulis

**K**omite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyoroti sejumlah isu penting dalam industri jasa keuangan. Salah satunya adalah ketimpangan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan. Banyak masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan, tapi banyak yang belum memahami bagaimana mengelola keuangan mereka secara bijak. Hal ini penyebab utama meningkatnya kasus penipuan investasi dan penyalahgunaan layanan pinjaman *online* (pinjol).

Karena itu, Komite IV DPD RI berkomitmen mengawal kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memastikan sistem keuangan yang adil, transparan, dan akuntabel. Berbagai tantangan seperti maraknya pinjaman *online* ilegal, rendahnya literasi keuangan, serta perlindungan konsumen menjadi perhatian utama Komite IV DPD RI.

“Jadi, penting penguatan pengawasan terhadap sektor keuangan guna meningkatkan stabilitas ekonomi nasional,” tegas Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi menegaskan dalam rapat kerja dengan Otoritas Jasa



Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi dan Ketua OJK Mahendra Siregar memperlihatkan kesepakatan rapat. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Keuangan (OJK) di Ruang Rapat Kutai, Gedung B DPD RI, Senin (10/3/2025)

Ketua Dewan Komisiner OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa industri jasa keuangan di Indonesia terus bertumbuh, meskipun menghadapi berbagai tantangan. Peningkatan literasi keuangan masyarakat, penguatan regulasi terhadap *fintech* dan pinjaman *online*, serta koordinasi dengan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae memaparkan bahwa industri perbankan nasional mengalami pertumbuhan positif dengan peningkatan kredit sebesar 10,39% dan aset perbankan sebesar 5,91%

pada akhir 2024. Namun, ia juga mengingatkan adanya tekanan pada likuiditas akibat tingginya suku bunga yang dapat berdampak pada profitabilitas bank.

Dalam rapat tersebut, Komite IV DPD RI merekomendasikan agar OJK lebih aktif dalam melakukan edukasi keuangan kepada masyarakat. Selain itu, penguatan pengawasan terhadap *fintech* ilegal juga menjadi prioritas utama guna memastikan keamanan ekosistem keuangan digital di Indonesia. DPD RI juga mendorong OJK untuk mempercepat implementasi regulasi yang lebih ketat bagi industri jasa keuangan agar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. (\*)

# Korpri Setjen DPD RI Bagikan 1001 Bingkisan

Nanda Russia Rola

Penulis

**D**alam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 H, Korpri Sekretariat Jenderal DPD RI memberikan 1001 paket bingkisan lebaran kepada aparatur sipil negara (PPPK dan PPNPN) dan staf pendukung di lingkungan Setjen DPD RI, baik di pusat maupun di daerah, di Loby DPD RI, Jakarta, Rabu (19/3/25).

Pemberian paket lebaran itu merupakan bentuk kepedulian nyata dan tekad Korpri Setjen DPD RI untuk senantiasa menjalin hubungan yang harmonis dengan seluruh anggota. Untuk itu, Korpri Setjen DPD RI menyerahkan paket bingkisan kepada anggota Korpri dan staf pendukung di pusat sebanyak 1001 bingkisan. Pengelolaan bingkisan itu dikerjasamakan dengan Dharma Wanita Persatuan Setjen DPD RI.

“Pemberian bingkisan ini sejalan dengan salah satu program Korpri, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota. Kami berharap pemberian bingkisan lebaran ini bisa bermanfaat di tengah situasi meningkatnya harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H,” kata Ketua Korpri Setjen DPD RI Oni Choiruddin.

Oni memberikan paket bingkisan lebaran, juga mem-



Sekjen DPD RI Rahman Hadi menyerahkan bingkisan lebaran dan bantuan secara simbolis kepada pegawai Setjen DPD RI yang terdampak banjir. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“**Pemberian bingkisan ini sejalan dengan salah satu program Korpri, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota. Kami berharap pemberian bingkisan lebaran ini bisa bermanfaat di tengah situasi meningkatnya harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H.**”

**Ketua Korpri Setjen  
DPD RI,  
Oni Choiruddin**

berikan bantuan kepada pegawai yang terkena bencana banjir pada 5 Maret 2023 lalu. “Korpri Setjen DPD RI juga memberikan bantuan terhadap pegawai yang terdampak

musibah banjir. Semoga bantuan ini bermanfaat dan dapat meringankan atas derita musibah yang dialami,” harapnya.

Sekjen DPD RI Rahman Hadi mengapresiasi setinggitingginya kepada Korpri Setjen DPD RI yang telah membagikan bingkisan tersebut. Menurutnya, bantuan dan bingkisan itu bisa meringankan kebutuhan keluarga di tengah melonjaknya harga-harga bahan kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri.

Rahman Hadi juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Dharma Wanita Setjen DPD RI dan Korpri Setjen DPD RI yang selalu memberikan kepeduliannya kepada anggotanya. Ia juga berpesan kepada pegawai yang akan kembali ke kampung halaman untuk selalu berhati-hati dan menjaga kesehatan. (\*)



# Muhammad Rifqi Farabi

Betria Eriani

Penulis

**M**uhammad Rifqi Farabi adalah seorang tokoh muda yang tengah menapaki dunia politik dengan terpilih sebagai anggota DPD RI pada Pemilu 2024. Ia merupakan putra sulung dari Tuan Guru Bajang (TGB) KH Muhammad Zainul Majdi, mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menjabat selama dua periode dari 2008 hingga 2018. Sebagai anak sulung dari pasangan TGB dan Hj Robiatul Adawiyah, Farabi tumbuh dalam lingkungan religius dan intelektual yang kuat. Tiga adiknya, Zahwa Nadhira, Fatima Azzahra, dan Zayda Salima, juga dikenal memiliki latar belakang pendidikan yang baik.

Pendidikan tinggi Farabi ditempuh di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, sebuah institusi yang dikenal sebagai salah satu pusat ilmu keislaman dunia. Di kalangan masyarakat NTB, khususnya jamaah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiah (NWDI), namanya telah dikenal luas sebagai pendakwah muda yang santun dan berkarisma. Gaya ceramahnya yang lembut serta penguasaan ilmu agama yang baik membuatnya disebut sebagai cerminan dari sang ayah, TGB. Tak heran, banyak pihak melihatnya sebagai penerus

dakwah dan perjuangan intelektual keluarga.

Terjun ke dunia politik bukanlah sesuatu yang asing bagi Farabi. Dengan bimbingan dan diskusi bersama TGB serta tokoh-tokoh lain, ia mantap menjadi senator dari daerah pemilihan NTB. Menurutnya, politik bukanlah hal yang tabu, melainkan jalan untuk berkhidmat kepada umat. Dengan membawa semangat pengabdian, ia berharap dapat memberikan manfaat lebih luas melalui jalur politik, sebagaimana telah dibuktikan oleh banyak pemimpin sebelumnya.

Muhammad Rifqi Farabi berhasil terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia mewakili Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Pemilu 2024, dengan perolehan suara sebanyak 284.126, menempatkannya di posisi ketiga dari empat kursi yang tersedia untuk NTB.

Dengan pengalaman di dunia dakwah dan pendidikan tinggi dari Al Azhar, Muhammad Rifqi Farabi membawa semangat baru dalam perpolitikan NTB. Keputusannya untuk maju sebagai anggota DPD

RI bukan sekadar ajang kontestasi, melainkan bentuk nyata dari komitmennya dalam mengabdikan kepada masyarakat. Dengan niat yang baik dan ikhtiar yang sungguh-sungguh, ia berharap dapat menjalankan peran politiknya sebagai bagian dari upaya memperjuangkan aspirasi rakyat NTB di tingkat nasional.

Sebagai anggota Komite III DPD RI, Farabi memiliki fokus utama pada bidang pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Ia berperan sebagai mitra pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di NTB. (\*/berbagai sumber)



# Daud “Cino” Yordan

Arso P Nugroho

Penulis

**D**aud “Cino” Yordan adalah sosok petinju tangguh asal Indonesia yang namanya harum hingga kancah internasional. Ia dikenal luas sebagai salah satu atlet terbaik Tanah Air dalam dunia tinju profesional. Namun kini, Daud tak hanya dikenal di ring, tetapi juga di arena politik nasional setelah terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam Pemilu 2024. Kemenangannya ini menjadi bukti bahwa dedikasi dan semangat juang bisa membuka jalan di berbagai bidang kehidupan.

Lahir dan besar di lingkungan sederhana di Kalimantan Barat, Daud tumbuh dengan semangat pantang menyerah. Masa kecil yang penuh tantangan membentuk kepribadiannya menjadi pribadi yang gigih dan disiplin. Ia mengawali perjalanan tinju dari bawah, berlatih keras tanpa fasilitas mewah, namun dengan tekad kuat untuk menjadi juara. Ketekunan inilah yang membawanya meraih prestasi luar biasa, menjadikan dirinya simbol kebanggaan Indonesia.

Karier Daud di dunia tinju diwarnai berbagai kemenangan mengesankan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ia telah mengoleksi lebih dari 40 keme-

nangan, termasuk 30 kemenangan melalui knockout (KO). Gelar-gelar bergengsi seperti WBC Asian Silver Super Light, IBA World Superlight, dan WBO Oriental Superlight berhasil ia raih. Kemenangan-kemenangannya tak hanya memperlihatkan keahliannya di atas ring, tetapi juga mencerminkan kerja keras dan komitmen yang tak pernah pudar.

Kini, sebagai senator dari Kalimantan Barat, Daud membawa semangat yang sama dari ring tinju ke panggung parlemen. Ia menyebut Pontianak sebagai rumahnya, dan menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan masyarakat yang telah memilihnya sebagai wakil daerah di DPD RI. Daud bertekad untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Kalbar dengan sepenuh hati, seperti ia memperjuangkan setiap pertarungan dalam karier tinjunya.

Meski kini sibuk di dunia politik, Daud belum sepenuhnya meninggalkan dunia tinju. Ia dijadwalkan kembali naik ring dalam pertandingan internasional bertajuk “Laga di Khatulistiwa” pada 7 September 2024 di GOR Ayani, Pontianak. Dalam laga perebut-

an gelar dunia kelas ringan super versi IBA itu, Daud akan menghadapi petinju asal Argentina, Hernan Leandro Carrizo. Pertarungan ini menjadi penanda kembalinya Daud ke ring setelah hampir dua tahun vakum.

Perjalanan hidup Daud Cino Yordan adalah kisah inspiratif tentang keberanian, ketekunan, dan keyakinan pada mimpi besar. Dari kampung kecil di Kalimantan Barat, ia menembus ring tinju dunia, dan kini turut serta menentukan arah kebijakan bangsa di parlemen. Sosoknya menjadi contoh nyata bahwa siapa pun bisa mencapai kesuksesan bila

disertai usaha, integritas, dan dedikasi tanpa henti. (\*/berbagai sumber)



(Foto Antara)



# Ulos Batak: Kain Leluhur yang Menenun Nilai dan Identitas



Ulos (Foto Kompas.Com)

**Theresia Oktavina**

Penulis

**U**los adalah kain tradisional khas suku Batak di Sumatera Utara yang memiliki nilai budaya, spiritual, dan sosial yang sangat tinggi. Kata “ulos” dalam bahasa Batak berarti selimut, namun maknanya lebih dalam dari sekadar pelindung tubuh. Ulos adalah simbol kasih sayang, penghormatan, dan doa. Dalam masyarakat Batak, ulos dianggap sakral dan sering digunakan dalam berbagai ritus adat seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian.

Sejak zaman nenek moyang, ulos ditenun secara manual oleh perempuan Batak menggunakan alat tenun tradisional. Benang dipintal dari kapas dan diwarnai de-

ngan pewarna alami sebelum ditenun menjadi kain bermotif khas. Setiap corak dan warna ulos memiliki makna tertentu sesuai konteks adat. Misalnya, ulos ragidup melambangkan doa panjang umur dan sering diberikan dalam pernikahan, sementara ulos sapat digunakan dalam upacara kematian.

Dalam struktur sosial Batak yang berbasis marga atau klan, pemberian ulos adalah simbol restu dan kasih sayang. Tradisi ini dikenal sebagai mangulosi, yang mempererat hubungan kekeluargaan dan memiliki nilai spiritual tinggi. Bahkan di perantauan, ulos tetap menjadi penanda identitas Batak yang melekat kuat dalam kehidupan masyarakatnya.

Seiring waktu, ulos mengalami transformasi dari kain

adat menjadi bagian dari industri kreatif. Perancang busana nasional dan internasional mulai mengangkat motif ulos ke dalam karya modern, membuka peluang ekonomi baru bagi penenun tradisional. Ini tidak hanya menjaga eksistensi ulos, tapi juga memperkenalkan budaya Batak ke panggung global.

Pemerintah daerah dan komunitas budaya di Sumatera Utara aktif mempromosikan pelestarian ulos lewat festival, pelatihan menenun, hingga perlindungan hak kekayaan intelektual. Ulos bukan sekadar warisan budaya, tetapi jati diri yang menenun nilai, sejarah, dan harapan. Keindahannya tidak hanya pada warna dan motif, tetapi pada makna dan semangat hidup yang dibawanya.

(\*berbagai sumber)

## *Batak Ulos: Ancestral Fabric That Weaves Values and Identity*



Weaving Ulos (Photo from Wikipedia)

**Theresia Oktavina**

Writer

**U**los is a traditional fabric of the Batak people in North Sumatra, possesses a very high cultural, spiritual and social values. The word “ulos” in Batak means blanket, but its meaning goes deeper than a mere body cover. Ulos symbolizes love, respect, and blessings. Among Batak communities, ulos is upheld sacred and is commonly used in various traditional rites, such as birth, marriage, and death ceremonies.

Since ancient times, ulos has been woven manually by Batak women using traditional non-mechanical looms. The yarn is spun from cotton and dyed with natural dyes prior to being woven

into fabric of typical motifs. Each motif and colour carry a specific meaning in accordance with the customary context. For instance, ragidup ulos symbolizes a prayer for longevity and frequent gifts during weddings, while saput ulos is used in funeral rituals.

In the Batak social structure, which is based on clan or family lineage (*marga*), the presentation of ulos symbolizes a blessing and affection. This tradition is known as *mangulosi*, which strengthens kinship bonds and holds high spiritual value. Even in foreign places, ulos remains a strongly bonding symbol of Batak identity.

Over time, ulos has evolved from a purely traditional garment into a part of creative industry. National

and international fashion designers have begun incorporating ulos motifs into their modern designs, creating new economic opportunities for traditional weavers. This does not only help preserving the heritage of ulos but also introduces Batak culture to the global stage.

Local governments and culture communities in North Sumatra are actively promoting the preservation of ulos through festivals, weaving workshops, and intellectual property protection. Ulos is more than just a cultural heritage—it is an identity that weaves together values, history, and hope. Its beauty lies not only in its colours and motifs but also in the deep meaning and spirit of life it exhibits.

(\*various sources)



# Goa Gong: Simfoni Alam dari Kedalaman Pacitan



Foto SID Pariwisata Jatim

**M. Fathoni**

Penulis

**P**acitan, sebuah kabupaten di ujung barat daya Provinsi Jawa Timur, dikenal sebagai “Kota 1001 Goa”. Di antara deretan goa yang menakjubkan, Goa Gong menempati posisi istimewa sebagai salah satu destinasi wisata alam paling menarik dan memesona di kawasan ini. Goa ini terletak di Desa Bomo, Kecamatan Punung, sekitar 30 kilometer dari pusat kota Pacitan. Daya tarik utamanya terletak pada keindahan stalaktit dan stalagmit yang menghiasi setiap sudut ruang dalam goa, membentuk ornamen-ornamen alami yang luar biasa indah.

Nama “Gong” sendiri berasal dari suara bergema seperti bunyi gong yang terdengar dari dalam goa ketika bebatuan tertentu dipukul. Fenomena akustik inilah yang kemudian mem-

beri ciri khas unik pada Goa Gong. Suara ini bukan hanya sekadar daya tarik bunyi, tetapi juga menjadi simbol kekuatan alam yang tersembunyi di balik gelap dan sunyinya kedalaman bumi. Sensasi mendengar gema tersebut memberikan pengalaman spiritual dan emosional tersendiri bagi para pengunjung.

Goa ini memiliki kedalaman sekitar 256 meter dan terdiri dari beberapa ruang besar yang diberi nama-nama menarik, seperti Ruang Sندان Bidadari, Ruang Kristal, dan Ruang Marmer. Setiap ruang menawarkan formasi batuan yang berbeda dan seolah menjadi galeri seni alam yang memukau. Pencahayaan warna-warni yang dipasang secara strategis menambah dramatis suasana, membuat formasi stalaktit dan stalagmit terlihat seperti pahatan artistik di dalam katedral alam bawah tanah.

Untuk sampai ke dalam

Goa Gong, pengunjung harus menuruni anak tangga dan menyusuri lorong sempit dengan penerangan yang cukup baik. Meski perjalanan masuk sedikit menantang, semua rasa lelah akan terbayar begitu sampai di dalam. Hawa sejuk, gemerlap batu kristal, dan atmosfer mistis menciptakan pengalaman wisata yang tidak hanya memanjakan mata, tetapi juga mengundang perenungan akan keajaiban ciptaan Tuhan.

Fasilitas di sekitar Goa Gong cukup memadai. Tersedia area parkir luas, warung makan, pusat oleh-oleh, serta pemandu wisata lokal yang siap menjelaskan sejarah dan keunikan setiap sudut goa. Pemerintah daerah dan masyarakat sekitar juga aktif menjaga kebersihan dan keasrian kawasan wisata ini, sehingga kenyamanan dan keamanan pengunjung tetap terjaga dengan baik.

Sebagai ikon wisata alam Pacitan, Goa Gong tak hanya menarik wisatawan domestik, tetapi juga mulai dikenal wisatawan mancanegara. Keindahannya yang eksotis dan atmosfernya yang memikat menjadikan goa ini sebagai destinasi wajib bagi siapa pun yang mengunjungi Pacitan. Goa Gong adalah bukti nyata bahwa keindahan Indonesia tak hanya ada di permukaan, tetapi juga tersembunyi di kedalaman bumi yang misterius dan mempesona. (\*)

# Gong Cave: Nature's Symphony from the Depth of Pacitan

M. Fathoni

Writer

**P**acitan, a regency located in the southwestern tip of East Java Province, is known as the “City of a Thousand Caves.” Among the many awesome caves in the region, Gong Cave holds a special place as one of the most captivating and enchanting natural attractions. Located in Bomo Village, Punung District, approximately 30 kilometers from downtown Pacitan, the cave’s main attraction lies in the stunning stalactites and stalagmites that adorn every corner of its chambers, forming exquisite natural ornaments.

The name “Gong” comes from a gong-like echo heard within the cave when certain rocks are struck. This acoustic phenomenon earns Gong Cave its unique character. The resonating sound is not merely an auditory attraction—it symbolizes the power of the nature hidden within depth of the earth. The echo hearing sensation provides visitors with a unique spiritual and emotional experience.

The cave has a depth of approximately 256 meters and consists of several large chambers, which are called with fascinating name, such as the Angel’s Spring Room, the Crystal Room, and the



Foto Kompas Regional

Marble Room. Every chamber showcases different rock formations that resemble an enchanting natural art gallery. Strategically placed multicolour lighting enhances the dramatic ambiance, turning the stalactites and stalagmites forms like artistic carvings in an underground cathedral.

To reach the interior of Gong Cave, visitors have to descend stairways and pass through narrow corridors with adequate lighting. Although the path may be rather challenging, the effort is richly rewarded upon arrival. The cool air, glittering crystal rocks, and mystical atmosphere create an adventurous experience that is not only soothing to the eyes, but it is also prompting to meditate upon the wonders of God’s creation.

Facilities around Gong Cave are sufficiently provid-

ed. There are spacious parking areas, food stalls, souvenir shops, and local guides readily available to share the cave’s history and its features. The local administration and surrounding community are actively involved in keeping the cleanliness and well-maintaining the comfortability and safety of visitors.

As an iconic natural tourist destination in Pacitan, Gong Cave does not only draw domestic tourists, but it also begins to attract international tourists. Its exotic beauty and captivating atmosphere make it a must-visit destination for anyone exploring Pacitan. Gong Cave is living proof that Indonesia’s natural wonders are not only found on the surface, but they are also hidden within mysterious and fascinating depth of the earth. (\*)



# Binte Biluhuta: Semangkuk Rasa, Semangkuk Tradisi Gorontalo



Foto RRI

**Fandi Tri Prayogo**

Penulis

**K**etika berkunjung ke Gorontalo, tak lengkap rasanya jika tidak mencicipi kuliner khas yang satu ini: Binte Biluhuta, atau sering disebut juga Milu Siram. Hidangan ini merupakan sup jagung khas masyarakat Gorontalo yang menggambarkan kekayaan rasa dan tradisi kuliner pesisir. Nama “binte” berarti jagung dalam bahasa Gorontalo, sementara “biluhuta” berarti disiram, merujuk pada cara penyajian sup ini yang disiramkan di atas campuran bahan-bahan segar.

Binte Biluhuta merupakan kombinasi unik dari jagung manis yang telah dipipil, ikan cakalang atau udang rebus, kelapa parut muda, daun kemangi, dan perasan jeruk nipis. Bumbu-bumbu

khas seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit memberikan sentuhan pedas dan gurih yang menggugah selera. Kuah panas disiramkan langsung ke atas campuran tersebut, menghasilkan rasa yang segar, hangat, dan kompleks dalam setiap suapan.

Cita rasa Binte Biluhuta begitu kaya dan berlapis—manis dari jagung, gurih dari ikan atau udang, segar dari jeruk nipis dan daun kemangi, serta pedas yang membakar lidah. Kombinasi ini membuatnya bukan hanya sekadar makanan, tetapi juga pengalaman sensorik yang mengesankan. Tidak heran jika Binte Biluhuta menjadi kuliner favorit yang selalu dicari oleh wisatawan maupun masyarakat lokal.

Kuliner ini juga mencerminkan filosofi hidup masyarakat Gorontalo yang bersahaja dan akrab dengan

alam. Semua bahan yang digunakan merupakan hasil laut dan hasil bumi lokal, yang menunjukkan harmoni antara manusia dan lingkungan sekitarnya. Binte Biluhuta pun telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebuah pengakuan atas pentingnya makanan ini dalam identitas budaya Gorontalo.

Binte Biluhuta dapat dengan mudah ditemukan di warung-warung makan tradisional hingga restoran di Kota Gorontalo dan sekitarnya. Banyak pengunjung yang datang ke Gorontalo secara khusus untuk mencicipinya langsung di tempat asalnya. Bahkan, beberapa hotel dan penginapan di Gorontalo menjadikan Binte Biluhuta sebagai menu andalan untuk menyambut tamu-tamu dari luar daerah.

Sebagai ikon kuliner Gorontalo, Binte Biluhuta lebih dari sekadar makanan—ia adalah perwujudan rasa syukur, kebersamaan, dan kearifan lokal. Dalam semangkuknya terkandung warisan budaya yang patut dijaga dan dikenalkan kepada generasi selanjutnya. Mencicipi Binte Biluhuta berarti menikmati rasa sekaligus menyelami cerita panjang sebuah peradaban kuliner pesisir utara Sulawesi. (\*)

# Binte Biluhuta: A Bowl of Flavor, A Bowl of Gorontalo Tradition



Foto Viva

**Fandi Tri Prayogo**

Writer

**A** visit to Gorontalo wouldn't be complete without tasting the signature local dish: Binte Biluhuta, also known as Milu Siram. This corn soup is a culinary heritage of the Gorontalo people, reflecting the rich flavors and traditions of the coastal community. The word “binte”

means corn in the Gorontalo language, while “biluhuta” means poured, referring to the way the hot soup is poured over a mix of fresh ingredients.

Binte Biluhuta is a unique blend of sweet corn kernels, boiled skipjack tuna

or steamed shrimp, grated young coconut, basil leaves, and a squeeze of lime. Typical spices like shallots, garlic, and chili paddy create mouth-watering spicy and savory taste. The hot soup is poured over the mixture, creating a fresh, warm and rich taste in every spoon.

The taste of Binte Biluhuta is rich and manifold—sweetness of the corn, savor of the fish or shrimp, freshness of the lime and basil, and spice of the chilies. The mixture makes it more than just a dish—it's a memorable sensory experience. No wonder Binte Biluhuta is a favorite culinary delicacy, most sought after by both visitors and locals.

This dish also represents the life philosophy of the Gorontalo people—simple and friendly to nature. All ingredients come from local sea and crops, symbolizing harmony between humans and their environment. Binte Biluhuta has been recognized as an Intangible Cultural Heritage of Indonesia by the Ministry of Education and Culture, an endorsement to its significance in Gorontalo's cultural identity.

You can easily find Binte Biluhuta in traditional food stalls and restaurants around Gorontalo City and its surrounding. Many tourists visit Gorontalo specifically to taste the dish in its place of origin. Even some hotels and guesthouses in Gorontalo deliberately serve Binte Biluhuta as a signature dish to welcome guests from other regions.

As a culinary icon of Gorontalo, Binte Biluhuta is more than just food—it is a reflection of gratitude, togetherness, and local wisdom. Within a bowl lies a cultural legacy worthy to be preserved and passed on to future generations. To taste Binte Biluhuta is to enjoy the flavor while diving into the long-standing story of a coastal culinary civilization in Northern Sulawesi. (\*)



# HARI RAYA IDULFITRI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

Oleh:

Arie Aat Hartadi/Analisis Legislatif pada Pusat Kajian Daerah dan Anggaran Setjen DPD RI

**H**ari Raya Idulfitri tidak hanya merupakan perayaan keagamaan yang sarat makna spiritual, tetapi juga menjadi momen penting dalam siklus ekonomi nasional, terutama di tingkat daerah. Perayaan ini memicu berbagai aktivitas sosial dan ekonomi yang berdampak langsung pada perputaran uang, peningkatan konsumsi, dan penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Oleh karena itu, momen ini dapat dimanfaatkan secara strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan inklusif di berbagai wilayah Indonesia.

Salah satu dampak paling nyata dari perayaan Idulfitri adalah meningkatnya konsumsi masyarakat. Hal ini dipicu oleh pencairan tunjangan hari raya (THR), bonus tahunan, dan dorongan psikologis masyarakat untuk berbelanja sebagai bentuk ekspresi kebahagiaan menyambut hari kemenangan. Peningkatan konsumsi ini memberi efek domino pada berbagai sektor ekonomi, mulai dari perdagangan ritel, kuliner, hingga transportasi dan pariwisata lokal.

Tradisi mudik yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia turut memperkuat dinamika ekonomi daerah. Jutaan perantau yang kembali ke kampung halaman membawa serta dana yang tidak sedikit, yang kemudian dibelanjakan di daerah asal mereka. Fenomena ini meningkatkan omzet pedagang lokal, memperkuat perputaran uang di daerah, serta menciptakan peluang kerja sementara di sektor informal seperti pedagang musiman, penyedia jasa transportasi lokal, hingga akomodasi rumah singgah.

Di samping dampak langsung terhadap sektor konsumsi, Hari Raya Idulfitri juga mendorong pertumbuhan sektor jasa dan industri kreatif. Kebutuhan akan pakaian baru, kue khas lebaran, souvenir, dan jasa pengiriman barang meningkat secara drastis. Banyak pelaku usaha kecil dan menengah memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan produksi dan pendapatan. Kreativitas masyarakat dalam menyediakan produk-produk khas lebaran menunjukkan potensi besar ekonomi lokal yang bisa dikembangkan lebih

lanjut dengan dukungan kebijakan yang tepat.

Namun demikian, peningkatan aktivitas ekonomi selama Idulfitri juga membawa tantangan tersendiri. Lonjakan konsumsi yang bersifat musiman dapat memicu inflasi jangka pendek, terutama pada kebutuhan pokok. Harga-harga bahan makanan cenderung naik karena tingginya permintaan, yang pada akhirnya dapat membebani masyarakat berpenghasilan rendah. Kondisi ini menuntut adanya intervensi kebijakan yang cermat agar stabilitas ekonomi tetap terjaga.

Dalam konteks ini, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memiliki peran penting untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi daerah tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga berorientasi jangka panjang. Sebagai wakil daerah, DPD RI dapat mendorong lahirnya regulasi yang berpihak kepada masyarakat lokal, termasuk kebijakan pengendalian harga dan penyediaan logistik bahan pokok menjelang Hari Raya.

Selain itu, DPD RI juga berperan dalam mengawal program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi,

terutama bagi pelaku UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi daerah. Dengan memberikan insentif yang tepat dan akses terhadap permodalan, pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksi mereka serta memperluas jangkauan pasar. Keberlanjutan usaha kecil ini menjadi krusial untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi pasca-lebaran.

Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPD RI menjadi kunci utama dalam merancang strategi ekonomi yang komprehensif. DPD RI dapat menjadi jembatan penghubung aspirasi daerah dengan kebijakan nasional, sehingga program-program ekonomi yang diluncurkan pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat di daerah. Penguatan sinergi antarlembaga ini akan memastikan bahwa momen Idulfitri tidak hanya menjadi euforia sesaat, tetapi juga momentum strategis untuk akselerasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Lebih jauh, penguatan ekonomi daerah saat Idulfitri juga berkontribusi terhadap pengurangan kesenjangan antarwilayah. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di luar pusat-pusat kota besar, maka perputaran ekonomi menjadi lebih merata. Hal ini sejalan dengan semangat desentralisasi fiskal dan penguatan otonomi daerah yang menjadi bagian dari

# IDUL FITRI & EKONOMI DAERAH

## Momentum Religius yang Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Tradisi mudik dan konsumsi masyarakat memacu geliat ekonomi lokal. Bagaimana peran DPD RI dalam mengawalinya?



**THR & Bonus**  
Daya beli masyarakat meningkat



**Perdagangan**  
Toko & pasar ramai



**Transportasi & Mudik**  
Mobilitas antar wilayah tinggi



**Kuliner & Wisata**  
Sektor jasa tumbuh pesat



Idul Fitri bukan hanya perayaan, keagamaan, tapi juga peluang mendorong ekonomi daerah secara berkelanjutan”

### FAKTA & ANGKA

85% UMKM di daerah mengalami peningkatan omzet

Peningkatan konsumsi bisa mencapai 20-30%

Inflasi musiman naik 0,2-0,5%

### Peran Strategis DPD RI

✓ Mengawasi harga dan distribusi bahan pokok

📋 Mendorong program insentif UMKM

↻ Menyuarakan aspirasi daerah ke pusat

🤝 Mendorong sinergi pusat dan daerah dalam kebijakan pasar

agenda reformasi pembangunan nasional.

Dengan demikian, Hari Raya Idulfitri bukan hanya menjadi simbol spiritual dan budaya, tetapi juga menjadi penggerak utama roda perekonomian daerah. DPD RI sebagai lembaga representatif daerah harus terus mengawal agar manfaat ekonomi

dari perayaan ini dapat dimaksimalkan dan dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan strategi dan kebijakan yang tepat, momentum Idulfitri dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. (\*)



**PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI  
BESERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI**

Mengucapkan

# *Hari Nelayan Nasional*

6 April 2025



## MEDIA PUBLIKASI DIGITAL DPD RI



LANDING DPD RI

